

2025



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN DIY**

Jalan Kusumanegara No. 9, Yogyakarta  
Telp. : (0274) 512063; Fax : (0274) 581335  
Surel : [program\\_indagkop@yahoo.co.id](mailto:program_indagkop@yahoo.co.id)  
Laman : [disperindag.jogjaprovo.go.id](http://disperindag.jogjaprovo.go.id)



# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022 – 2027 dan Dokumen Penyelarasan Kinerja. Proses penyusunan laporan ini memperhatikan prinsip responsif gender dan inklusi sosial serta membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Dibuat di Yogyakarta  
Pada tanggal 17 Maret 2026



Kepala  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
DIY,

Yuna Pancawati, S.E., M.Si



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**INSPEKTORAT**

*Inspektorat Daerah*

Alamat Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Kode Pos 55166 Telepon (0274) 562009  
Faksimile (0274) 512567 Pos-el inspektorat@jogjaprovo.go.id Laman <https://inspektorat.jogjaprovo.go.id>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat dan valid serta dapat diukur pencapaiannya sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih andal.

Berdasarkan reviu yang telah kami laksanakan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini serta atas catatan dalam proses reviu telah ditindaklanjuti oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

Yogyakarta, 11. Maret 2026

Inspektur DIY,



Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc.

# **Ikhtisar Eksekutif**

Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian tujuan 1 “Terwujudnya daya saing sektor industri” :
  - Diukur dengan indikator kontribusi pengolahan terhadap PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun n. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) subsektor industri pengolahan pada tahun n dibagi total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) DIY pada tahun n dikalikan 100%. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/region tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun untuk melihat pergeseran struktur ekonomi
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis, yakni meningkatnya industri pengolahan, serta meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah.
  - Target capaian indikator tujuan perangkat daerah tahun 2025 sebesar 12,20% sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 11,89%. Dengan demikian capaian ini masih di bawah target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 97,59%
  - Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, kontribusi pengolahan terhadap PDRB DIY tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,5% dengan nilai sebesar 487.321 juta rupiah.
2. Capaian tujuan 2 “ Terwujudnya daya saing sector perdagangan”:
  - Diukur dengan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB DIY tidak dilakukan penyesuaian terhadap target indicator karena target kinerja tahun n masih lebih tinggi dari capaian kinerja tahun n-1. Persentase kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) subsektor perdagangan terhadap total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di DIY pada tahun n. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) subsektor perdagangan pada tahun n dibagi total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) DIY pada tahun n dikalikan 100%. PDRB adalah

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/ region tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun untuk melihat pergeseran struktur ekonomi.

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) sasaran yaitu meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
- Target capaian indikator tujuan perangkat daerah tahun 2025 sebesar 8,44% sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 8,05%. Dengan demikian capaian ini masih di bawah target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 95,83%.
- Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB DIY tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar sebesar 0,50% dengan selisih sebesar 360.507 juta rupiah.

3. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri”

- Diukur dengan indikator Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) subsektor perdagangan pada tahun n dibandingkan dengan tahun n-1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) subsektor perdagangan tahun n dikurangi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) subsektor perdagangan tahun n-1 dibagi dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) subsektor perdagangan tahun n-1 dikalikan 100%. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/ region tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 5 (lima) program, yakni Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program 4 Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 5,32%; dengan nilai realisasi sebesar 3,94%. Dengan demikian capaian ini masih dibawah target yang telah ditetapkan. Persentase realisasi terhadap target mencapai 74,06%.
  - Dibandingkan dengan realisasi laju pertumbuhan perdagangan dalam PDRB tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 0,06%.
4. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya industri pengolahan”
- Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) subsektor industri pengolahan pada tahun n dibandingkan dengan tahun n-1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) subsektor industri pengolahan tahun n dikurangi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) subsektor industri pengolahan tahun n-1 dibagi dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) subsektor industri pengolahan tahun n-1 dikalikan 100%. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/ region tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).
  - Diukur dengan indikator Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 6 (enam) program, yakni Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 2,50%; dengan nilai realisasi sebesar 3,63%. Dengan demikian capaian ini sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Persentase realisasi terhadap target mencapai 145,20%
  - Dibandingkan dengan realisasi laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 0,50%.
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 5 (lima) program, yakni Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Stabilisasi Harga

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program 4 Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;

- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 5,32%; dengan nilai realisasi sebesar 3,94%. Dengan demikian capaian ini masih dibawah target yang telah ditetapkan. Persentase realisasi terhadap target mencapai 74,06%.
  - Dibandingkan dengan realisasi laju pertumbuhan perdagangan dalam PDRB tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 0,06%
5. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat”
- Diukur dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah. Nilai Kategori Reformasi Birokrasi; AA=1 (Skor>100); A=2 (>80 s.d 100); BB=3 (>70-80); B=4 (>60-70); CC=5 (>50-60); C=6 (>30-50). Nilai kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB.
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 adalah nilai A, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi hasil penilaian RB dengan nilai A. Dengan demikian capaian ini telah sesuai dengan target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Ekspor produk kayu ke Negara tujuan utama ekspor DIY, terutama di Uni Eropa terkendala oleh pemberlakuan regulasi anti deforestasi (*Europe Union Deforestation Regulation/EUDR*).
2. Maraknya produk impor yang masuk ke Indonesia dengan harga yang murah.
3. Menurunnya daya beli masyarakat baik Indonesia maupun di negara tujuan ekspor.
4. Mahalnya harga transportasi pengiriman/ logistic terutama ke Eropa dikarenakan tidak bias melewati laut merah.
5. Ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlanjut menyebabkan naiknya harga energi dan minyak dunia. Hal ini menyebabkan mahalnya harga bahan baku

impor. Imbasnya terhadap para pelaku usaha industri yang menggunakan bahan baku impor kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.

6. Pemanfaatan teknologi produksi yang masih perlu di tingkatkan.

# Daftar Isi

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar .....                                                                                              | 1  |
| Ikhtisar Eksekutif .....                                                                                          | 3  |
| Daftar Isi .....                                                                                                  | 8  |
| Daftar Tabel .....                                                                                                | 9  |
| Daftar Gambar .....                                                                                               | 10 |
| BAB I Pendahuluan .....                                                                                           | 11 |
| 1.1. <i>Cascading</i> Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ..... | 11 |
| 1.1. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan .....                                                                         | 13 |
| 1.2. Isu-Isu Strategis .....                                                                                      | 16 |
| 1.3. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran .....                                                            | 17 |
| 1.4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 .....                                             | 19 |
| BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....                                                                   | 21 |
| 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD .....                                                              | 21 |
| 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan .....                                                                            | 22 |
| 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025 .....                                                               | 24 |
| 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....                                                                          | 34 |
| 2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....                                                                    | 40 |
| BAB III Akuntabilitas Kinerja .....                                                                               | 44 |
| 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025 .....                                                                             | 44 |
| 3.2. Capaian Kinerja Lainnya .....                                                                                | 79 |
| 3.3. Analisis Efisiensi Anggaran .....                                                                            | 86 |
| 3.4. Inovasi .....                                                                                                | 87 |
| 3.5. Lintas Sektor .....                                                                                          | 87 |
| BAB IV Penutup .....                                                                                              | 93 |
| 4.1. Kesimpulan .....                                                                                             | 93 |
| 4.2. Langkah Perbaikan Kinerja .....                                                                              | 94 |
| L A M P I R A N .....                                                                                             | 96 |

# Daftar Tabel

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi                                                 | 17 |
| Tabel I.2 Sarana-Prasarana                                                                                                         | 18 |
| Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025                                                                                                      | 19 |
| Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024                                                               | 19 |
| Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Srategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 2022-2027                                           | 22 |
| Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan                                                                                             | 23 |
| Tabel II.3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 | 24 |
| Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tujuan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2025                                     | 34 |
| Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Sasaran Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2025                                    | 36 |
| Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2025                           | 38 |
| Tabel II.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2025                          | 38 |
| Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja                                                                                          | 44 |
| Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025                                                                                             | 44 |
| Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan                                                                            | 46 |
| Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025                                                                         | 46 |
| Tabel III.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan                                                                            | 50 |
| Tabel III.6 Target dan Realisasi Kinerja sasaran 1 Tahun 2025                                                                      | 50 |
| Tabel III.7 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1                                              | 51 |
| Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Tujuan 2                                                                   | 61 |
| Tabel III.9 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan 2                                                                                  | 61 |
| Tabel III.10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan                                                                           | 62 |
| Tabel III.11 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2                                                                                | 63 |
| Tabel III.12 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2                                                        | 64 |
| Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3                                                                 | 72 |
| Tabel III.14 Skema dan bobot nilai Evaluasi Reformasi Perangkat Daerah                                                             | 73 |
| Tabel III.15 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025                                                        | 74 |
| Tabel III.16 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2025 berdasar PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi   | 74 |
| Tabel III.17 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025                                                                               | 75 |
| Tabel III.18 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3                                             | 76 |
| Tabel III.19 Kontribusi Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY terhadap Capaian TPB/SDGs Pemerintah Daerah                | 79 |
| Tabel III.20 Kontribusi Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah DIY  | 82 |
| Tabel III.21 Kontribusi Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah DIY             | 83 |
| Tabel III.22 Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran Belanja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025                                         | 86 |
| Tabel III.23 Inventarisasi Lintas Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY                                                          | 88 |

## **Daftar Gambar**

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Gambar I.1 Cascading Kinerja Penyelarasan .....</b>                                                  | <b>12</b> |
| <b>Gambar I.2 Struktur Organisasi.....</b>                                                              | <b>13</b> |
| <b>Gambar I.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br/>DIY .....</b> | <b>14</b> |
| <b>Gambar I.4 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP .....</b>                         | <b>41</b> |
| <b>Gambar I.5 Aplikasi JBSC.....</b>                                                                    | <b>41</b> |
| <b>Gambar I.6 Aplikasi SIKONCER .....</b>                                                               | <b>42</b> |
| <b>Gambar I.7 Aplikasi Jogjaplaza .....</b>                                                             | <b>42</b> |
| <b>Gambar I.8 Aplikasi SIMAMAK .....</b>                                                                | <b>43</b> |
| <b>Gambar I.9 Aplikasi E-ARSIP .....</b>                                                                | <b>43</b> |
| <b>Gambar III.1 Pelayanan Surat Keterangan Asal .....</b>                                               | <b>53</b> |
| <b>Gambar III.2 Pemantauan harga bahan pokok dan bahan penting .....</b>                                | <b>54</b> |
| <b>Gambar III.3 Operasi Pasar .....</b>                                                                 | <b>54</b> |
| <b>Gambar III.4 Pengawasan Barang Beredar .....</b>                                                     | <b>55</b> |
| <b>Gambar III.5 Sidang BPSK .....</b>                                                                   | <b>56</b> |
| <b>Gambar III.6 Pelatihan Pemasaran Online .....</b>                                                    | <b>56</b> |
| <b>Gambar III.7 Pelatihan Marketplace Internasional.....</b>                                            | <b>67</b> |
| <b>Gambar III.8 Pameran Jiffina .....</b>                                                               | <b>68</b> |
| <b>Gambar III.9 Pameran Inacraft .....</b>                                                              | <b>68</b> |
| <b>Gambar III.10 Pelatihan Pengelola dan Operator UPT NKJ .....</b>                                     | <b>69</b> |
| <b>Gambar III.11 Pelayanan SKA .....</b>                                                                | <b>69</b> |

# BAB I Pendahuluan

## **Bab I berisi:**

*Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan Isu-Isu Strategis Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

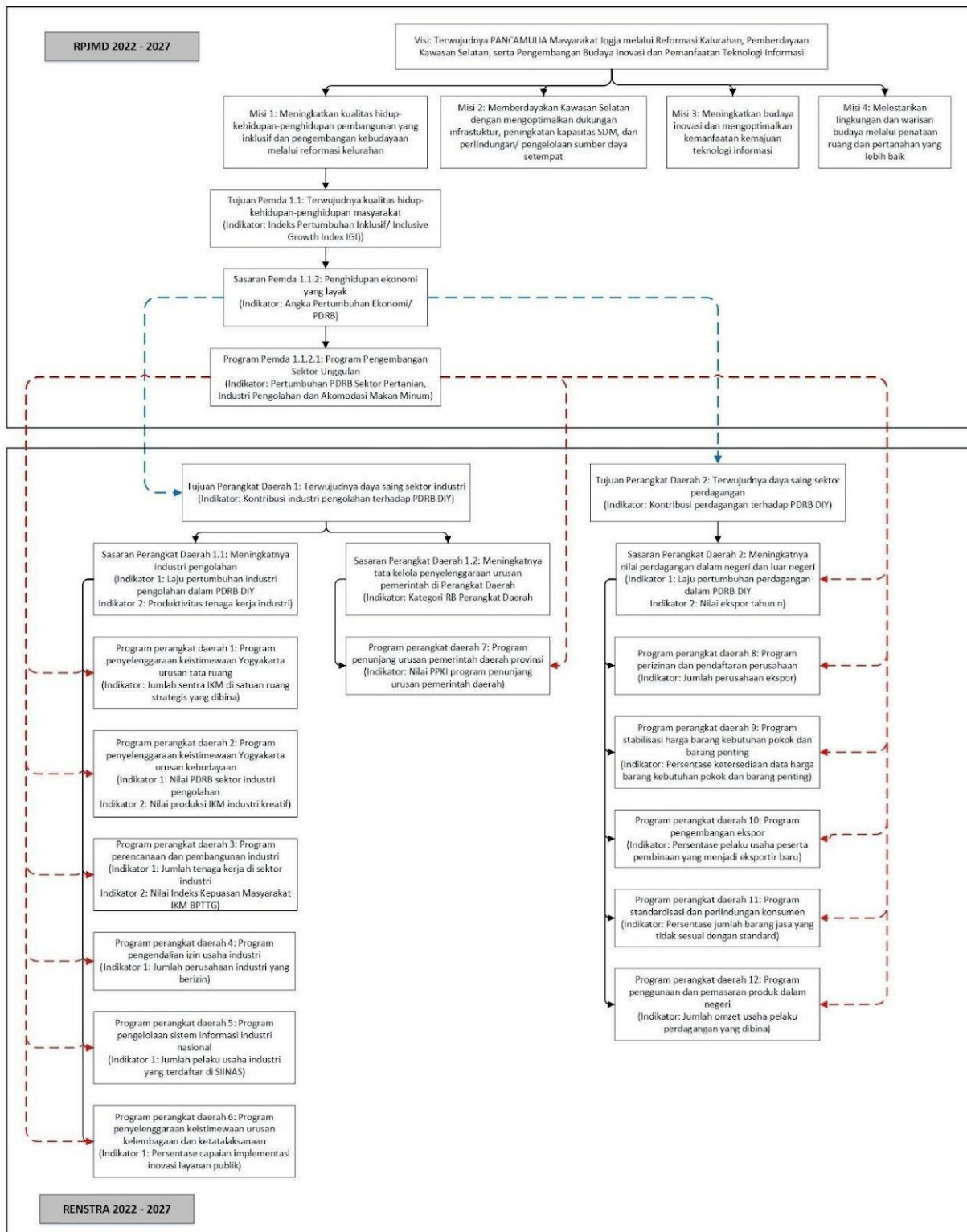
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

### **1.1. Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah**

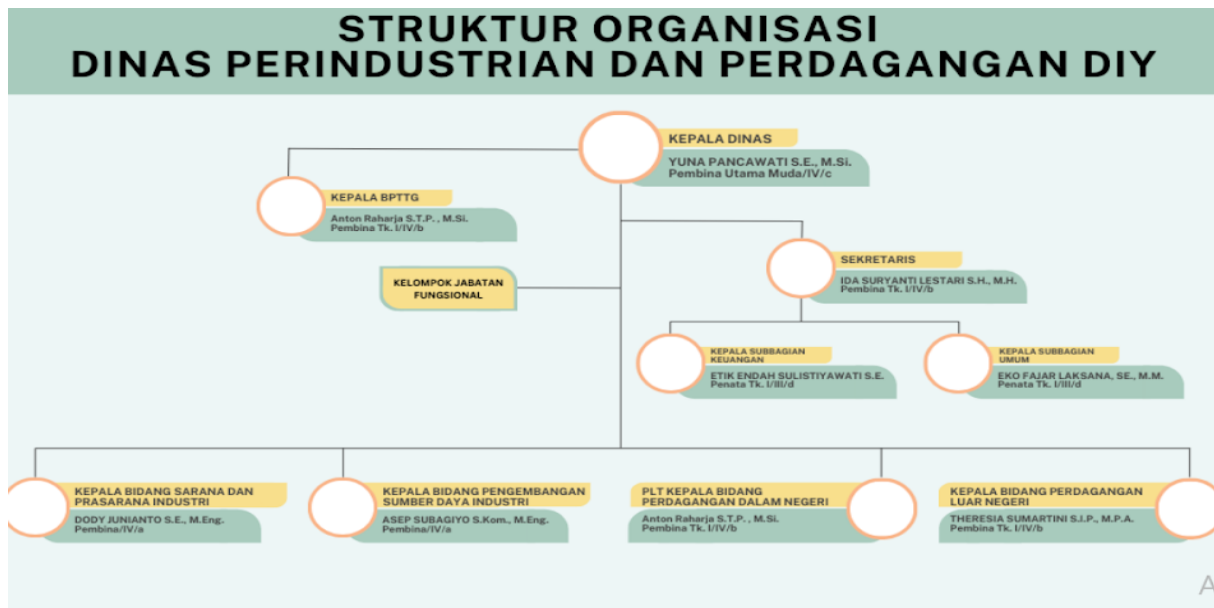
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Gambar 1 Cascading Kinerja Penyelarasan**



Sumber: RPJMD 2022-2027, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2022-2027

Gambar 2 Struktur Organisasi



Sumber: Lampiran PERGUB DIY Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

### 1.1. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD DIY 2022-2027, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

### **Gambar 3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY**

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mempunyai fungsi:

- penyusunan program kerja Dinas;
- perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
- pengembangan sumber daya manusia industri dan perdagangan;
- peningkatan pemanfaatan teknologi industri dan mutu standardisasi;
- peningkatan kerja sama industri dan perdagangan;
- fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan industri dan perdagangan;
- pengelolaan dan pelaporan data industri dan perdagangan;
- pembinaan dan pengawasan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
- fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan infrastruktur industri;
- fasilitasi sarana dan prasarana industri;
- pembinaan dan pengembangan industri kreatif;
- penyediaan layanan/fasilitasi konsultasi input dan sistem informasi industri nasional untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di lingkup Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya;
- fasilitasi rekayasa dan produksi alat tepat guna, layanan perbengkelan, konsultasi teknis dan informasi rekayasa alat tepat guna;
- fasilitasi kemasan dan produk kulit;
- pengawasan distribusi bahan berbahaya;
- penerbitan surat keterangan asal dan fasilitasi angka pengenal impor;
- pelaksanaan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
- pengawasan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- fasilitasi pengembangan dan promosi dalam negeri dan luar negeri;
- pelayanan perlindungan dan pemberdayaan konsumen;
- koordinasi dan fasilitasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
- pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup Dinas;
- pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Sesuai pelaksanaan tugas fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 99 tahun 2022 dapat dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa sebagai berikut :

| Jabatan Struktural                                        | Jabatan Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kepala Dinas                                           | 1. Dibawah Sekretaris:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Sekretaris:                                            | 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1) Kasubbag Keuangan                                      | 2) Analis Sistem Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2) Kasubbag Umum                                          | 2. Dibawah Kasubbag Keuangan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Kabid Pengembangan Sumber Daya Industri                | 1) Bendahara; 2) Pengadministrasi Keuangan; 3) Pengelola Gaji; 4) Pengelola Akuntansi; 5) Verifikator Data Laporan Keuangan                                                                                                                                                                                                                |
| 4. Kabid Sarana dan Prasarana Industri                    | 3. Dibawah Kasubbag Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. Kabid Perdagangan Dalam Negeri                         | 1) Pengadministrasi Umum; 2) Pengadministrasi Persuratan; 3) Pranata Kearsipan; 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; 5) Teknisi Sarana dan Prasarana; 6) Kustodian Barang Milik Negara; 7) Pengemudi                                                                                                                                    |
| 6. Kabid Perdagangan Luar Negeri                          | 4. Dibawah Kabid Pengembangan Sumber Daya Industri:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. Kabalai Pengembangan Teknologi Tepat Guna              | 1) Pengadministrasi Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1) Kasubag Tata Usaha                                     | 2) Analis Pengembangan Usaha Agro Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2) Kasi Rekayasa dan Produksi                             | 5. Dibawah Kabid Sarana dan Prasarana Industri:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3) Kasi Pengembangan dan Layanan Kemasan dan Produk Kulit | 1) Pengadministrasi Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           | 2) Analis Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                           | 6. Dibawah Kabid Perdagangan Dalam Negeri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | 1) Pengadministrasi Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           | 2) Analis Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                           | 3) Pengawas Barang Beredar dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                           | 4) Pengelola Fasilitas dan Mediasi Perlindungan Konsumen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           | 7. Dibawah Kabid Perdagangan Luar Negeri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                           | 1) Pengadministrasi Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           | 2) Analis Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                           | 3) Penyusun Rencana Analisis Pasar Luar Negeri                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                           | 8. Dibawah Kasubag Tata Usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                           | 1) Pengadministrasi Persuratan; 2) Pranata Kearsipan; 3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan; 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; 5) Kustodian Barang Milik Negara; 6) Bendahara; 7) Pengadministrasi Keuangan; 8) Pengelola Gaji; 9) Pengelola Akuntansi; 10) Verifikator Data Laporan Keuangan; 11) Teknisi Sarana dan Prasarana |
|                                                           | 9. Dibawah Kasi Rekayasa dan Produksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                           | 1) Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                           | 2) Pengelola Produksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                           | 10. Dibawah Kasi Pengembangan dan Layanan Kemasan dan Produk Kulit                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                           | 1) Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                           | 2) Pengelola kulit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## **1.2. Isu-Isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatnya daya saing industri dan perdagangan di tingkat nasional dan global”, antara lain sebagai berikut:

### **1. Pengentasan Kemiskinan**

Melalui pemberdayaan pelaku usaha sektor perindustrian dan perdagangan Angka kemiskinan di DIY yang masih tinggi, memerlukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Berkembangnya sektor perindustrian dan perdagangan akan berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja, menumbuhkan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan;

### **2. Meningkatnya persaingan usaha sektor perdagangan dalam negeri**

Peningkatan volume produksi daerah lain dan masuknya produk-produk luar negeri ke pasar domestik akibat perdagangan bebas meningkatkan persaingan di 13 pasar dalam negeri. Oleh karenanya peningkatan daya saing pelaku usaha sektor perdagangan perlu ditingkatkan agar dapat memenangkan persaingan.

### **3. Meningkatnya persaingan usaha sektor perdagangan luar negeri**

Perdagangan bebas membuka peluang bagi semua negara untuk menjual produknya ke negara lain. Hal ini mendorong peningkatan produktivitas negara-negara tersebut. Untuk memenangkan persaingan tersebut daya saing pelaku usaha sektor perdagangan luar negeri DIY harus tinggi.

### **4. Pengembangan Industri Kreatif**

Industri kreatif merupakan sektor yang dapat memberikan nilai tambah yang tinggi bagi pelakunya. Tersedianya sumber daya manusia kreatif di DIY merupakan penunjang utama pengembangan sektor ini. Pemusatan industri yang memiliki potensi polusi tinggi di kawasan industri merupakan hal yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan industri di DIY

### **5. Kekeringan Panjang akibat El Nino**

Berdampak pada produktivitas pertanian, seperti komoditas cabai, bawang merah, dan termasuk komoditas impor, seperti gula pasir. Selain itu, juga masih terbatasnya pasokan beras seiring mundurnya musim tanam yang berkontribusi pada peningkatan tingkat inflasi bahan pangan.

6. Penurunan permintaan produk ekspor

Akibat krisis ekonomi di Negara-negara tujuan ekspor utama (Amerika dan Eropa) dan kenaikan biaya logistik akibat perang Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina.

7. Berkembangnya Ekonomi Digital

Membuka peluang sekaligus memperketat persaingan bagi pelaku usaha sektor industri dan perdagangan DIY.

8. Berkembangnya implementasi ekonomi Syariah dan ekonomi hijau

Kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan yang adil dan ramah lingkungan. Integrasi keduanya sering disebut dengan *Green Islamic Finance*, menyatukan prinsip Syariah dan ekonomi hijau(berkelanjutan lingkungan)

### 1.3. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

| N<br>o | Jabatan                 | Formasi |             |    |    |     | Pegawai yang ada |             |    |    | Jenis Kelamin |           |    |
|--------|-------------------------|---------|-------------|----|----|-----|------------------|-------------|----|----|---------------|-----------|----|
|        |                         | Jml     | Kualifikasi |    |    |     | Jml              | Kualifikasi |    |    | Laki          | Perempuan |    |
| 1      | 2                       | 3       | 4           |    |    |     | 5                | 6           |    |    | 7             |           | 8  |
|        |                         |         | S2          | S1 | D3 | SMA |                  | S2          | S1 | D3 | SMA           |           |    |
| A.     | Jabatan Pimpinan Tinggi | 1       | 1           |    |    |     | 1                | 1           |    |    |               |           | 1  |
|        |                         |         |             |    |    |     |                  |             |    |    |               |           |    |
| B.     | Jabatan Administrasi    |         |             |    |    |     |                  |             |    |    |               |           |    |
|        | 1. Administrator        | 5       | 5           |    |    |     | 5                | 5           |    |    | 3             |           | 2  |
|        | 2. Pengawas             | 2       |             | 2  |    |     | 2                | 1           | 1  |    | 1             |           | 1  |
|        | 3. Pelaksana            | 63      |             | 44 | 9  | 10  | 36               | 1           | 21 | 4  | 10            | 16        | 20 |
| C.     | Jabatan Fungsional      | 53      |             | 47 | 6  |     | 24               | 15          | 8  | 1  |               | 14        | 10 |
|        | Jumlah                  | 124     | 6           | 93 | 15 | 10  | 68               | 23          | 30 | 5  | 10            | 34        | 34 |

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 30 orang (44,12%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 23 orang (33,82%), D3 sebanyak 5 orang (44,12%), SLTA 10 orang (14,71%). Berdasarkan data kepegawaian, dari total 68 pegawai, tidak terdapat pegawai penyandang disabilitas. Komposisi antara pegawai perempuan dan laki-laki sama, untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat laki-laki.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 56 orang, terdiri dari 19 orang pejabat pelaksana substantif dan 27 pejabat pelaksana administratif. Tidak terdapat pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif dan tidak terdapat pegawai yang tidak kompeten melaksanakan tugas dalam jabatan pelaksana substantif. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagai penyiap bahan perumusan kebijakan strategis di sektor industri dan perdagangan.

**Tabel I.2 Sarana-Prasarana**

| No | Klasifikasi                 | Jumlah Barang | Nilai Aset (Rp)* |
|----|-----------------------------|---------------|------------------|
| 1  | Aset Tetap                  |               |                  |
| 2  | Tanah                       | 10 unit       | 28.263.712.000   |
| 3  | Peralatan dan Mesin         | 2.402 unit    | 12.707.110.264   |
| 4  | Gedung dan Bangunan         | 27 unit       | 32.248.687.200   |
| 5  | Jalan, irigasi dan Jaringan | 18 unit       | 7.236.700.773    |
| 6  | Aset Tetap Lainnya          | 204 unit      | 2.596.419.250    |
| 6  | Konstruksi dalam Pengerjaan | 1 unit        | 69.700.000       |
| 1  | Aset Lainnya                |               |                  |
| 2  | Aset Tak Berwujud           | 38 unit       | 599.143.500      |
| 2  | Aset Lain-lain              | -             | -                |
|    | Jumlah                      |               | 83.721.472.987   |

Sumber: Data Neraca Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 31 Desember 2025 (Unaudited)

\*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2025

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 11 (sebelas) unit kendaraan operasional, dan 7 (tujuh) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

**Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025**

| Kode Rekening |          |    | Uraian                              | Sebelum Perubahan (Rp)    | Setelah Perubahan (Rp)    | Bertambah/ Berkurang (Rp)  |
|---------------|----------|----|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>4</b>      | <b>1</b> |    | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> | Rp. 315.400.000           | Rp. 320.400.000           | Rp. 5.000.000              |
| 4             | 1        | 02 | Retribusi Daerah                    | Rp. 315.400.000           | Rp. 320.400.000           | Rp. 5.000.000              |
| <b>5</b>      | <b>1</b> |    | <b>BELANJA OPERASI</b>              | <b>Rp. 37.357.570.531</b> | <b>Rp. 33.830.283.967</b> | <b>(Rp. 3.527.286.564)</b> |
| 5             | 1        | 01 | Belanja Pegawai                     | Rp. 16.196.592.431        | Rp. 15.862.684.817        | (Rp. 333.907.614)          |
| 5             | 1        | 02 | Belanja Barang dan Jasa             | Rp. 20.535.078.100        | Rp. 17.852.500.150        | (Rp. 2.883.373.050)        |
| 5             | 1        | 05 | Belanja Hibah                       | Rp. 625.000.000           | Rp. 315.000.000           | Rp. (310.000.000)          |
| <b>5</b>      | <b>2</b> |    | <b>BELANJA MODAL</b>                | <b>Rp. 363.458.000</b>    | <b>Rp. 990.302.000</b>    | <b>Rp. 626.844.000</b>     |
| 5             | 2        | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | Rp. 304.458.000           | Rp. 815.302.000           | Rp. 510.844.000            |
| 5             | 2        | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | Rp. 59.000.000            | Rp. 175.000.000           | Rp. 116.000.000            |
|               |          |    | Jumlah Belanja                      | <b>Rp. 37.721.028.531</b> | <b>34.820.906.367</b>     | <b>Rp. 25.373.430.322</b>  |

*Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2025*

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY APBD Daerah Istimewa Yogyakarta pada tabel 1.3 untuk tahun 2025 Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY semula Rp. 37.721.028.531,- dan mengalami perubahan menjadi 34.820.906.367 atau berkurang Rp. 25.373.430.322. Perubahan anggaran tahun 2025 merupakan cerminan dukungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran.

#### **1.4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024**

**Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024**

| No | Saran/Rekomendasi                                         | Tindak lanjut                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat | Disperindag telah melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya |

| No | Saran/Rekomendasi                                                                                                                                                                                                              | Tindak lanjut                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga pada masa selanjutnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Daerah; | pada komponen Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga pada masa selanjutnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Daerah; |
| 2. | Mempertahankan serta meningkatkan praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dalam rangka menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah DIY.                                                        | Disperindag telah berupaya mempertahankan serta meningkatkan praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dalam rangka menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah DIY.            |

## BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

### **Bab II berisi:**

Tujuan, Sasaran dan  
Indikator Kinerja OPD  
Strategi dan Arah  
Kebijakan  
Struktur Program dan  
Kegiatan Tahun 2025  
Perjanjian Kinerja Tahun  
2025  
Instrumen Pendukung  
Capaian Kinerja OPD

Tahun 2025 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan baik melalui mekanisme Penyelarasan Kinerja maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyelarasan Kinerja di Pemerintah Daerah DIY dilaksanakan sebagai upaya integrasi dengan arah kebijakan pembangunan nasional, sekaligus mereviu capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah melampaui target guna mendorong penetapan target yang lebih menantang dan berdampak pada periode berikutnya. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan Dokumen Penyelarasan Kinerja.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027.

### **2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD**

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah “Meningkatnya Good Governance”. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY selama lima tahun adalah:

**“Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang istimewa dengan memperhatikan bentuk dan susunan Pemerintahan Asli”**

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam waktu lima tahun yang telah diselaraskan dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 2022-2027**

| NO. | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS                                                         | INDIKATOR KINERJA                               | SATUAN | Kondisi Awal (Baseline 2022) | TARGET TAHUNAN |       |                |                |                | Target Akhir Periode*/Rencana |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|     |                                                                                  |                                                 |        |                              | 2023           | 2024  | 2025           | 2026           | 2027           |                               |
| 1   | 2                                                                                | 3                                               | 4      | 5                            | 6              | 7     | 8              | 9              | 10             | 11                            |
| A.  | Terwujudnya daya saing sektor industri                                           | Kontribusi PDRB industri Pengolahan             | %      | 12,05                        | 12,0           | 12,15 | 11,89 - 12,20* | 11,97 - 12,25* | 12,06 - 12,30* | 12,06 - 12,30*                |
|     | Meningkatnya industri pengolahan                                                 | Laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB | %      | 0,99                         | n/a            | 2,50  | 3,70*          | 3,80*          | 4,10*          | 4,10*                         |
| B.  | Terwujudnya daya saing sektor perdagangan                                        | Kontribusi perdagangan terhadap PDRB DIY        | %      | 8,29                         | 8,34           | 8,39  | 8,44           | 8,49           | 8,54           | 8,54                          |
|     | Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri                      | Laju pertumbuhan perdagangan dalam PDRB         | %      | 5,22                         | n/a            | 5,32  | 5,38           | 5,43           | 5,49           | 5,49                          |
| C   | Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di pemerintah daerah | Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah   |        | A                            | A              | A     | A              | A              | A              | A                             |

\* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

## 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

| TUJUAN                                       | SASARAN                                                 | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Terwujudnya daya saing Perdagangan sektor | 1. Meningkatnya nilai perdagangan dalam dan luar negeri | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran baik konvensional maupun online.</li> <li>2. penguatan perdagangan dalam negeri melalui kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga.</li> <li>3. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran</li> <li>2. Peningkatan kelancaran distribusi stabilitas harga</li> <li>3. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. Terwujudnya daya saing sektor Industri    | 2. Meningkatnya nilai industri pengolahan               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran produk baik secara konvensional maupun online,, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</li> <li>2. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (Green Sector)</li> <li>3. Penguatan dan penumbuhan IKM industri kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain pemasaran baik secara konvensional maupun online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk kreatif.</li> <li>4. Mengembangkan enterprenurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan.</li> <li>5. Koordinasi dan fasilitasi penyediaan Kawasan industri untuk IKM</li> <li>6. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk.</li> <li>2. Pengembangan teknologi industry yang mendukung proses produksi secara kuantitas maupun kualitas serta pengembangan industry yang berwawasan lingkungan (<i>Green Sector</i>)</li> <li>3. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemaaran produk kreatif.</li> <li>4. Pencipta wirausaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitas usaha</li> <li>5. Koordinasi dan fasilitasi penyediaan Kawasan industri untuk IKM.</li> <li>6. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY</li> </ol> |

| TUJUAN | SASARAN                                                                          | STRATEGI                                                            | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 3. Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah | Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan standarisasi | Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi pelayanan publik<br>Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi standarisasi penyelenggaraan pemerintah daerah |

### 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2025 dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel II.3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025**

| Tujuan                                                                          | Sasaran                                                        | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                          | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Meningkatnya daya saing industri dan perdagangan di tingkat nasional dan global | 1. Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri | <b>1.1 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>                                                                                                                                                                | <b>30.000.000</b>      | <b>25.800.000</b>      | <b>(4.200.000)</b>        |
|                                                                                 |                                                                | <b>1.1.1. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</b>                                                        | <b>30.000.000</b>      | <b>25.800.000</b>      | <b>(4.200.000)</b>        |
|                                                                                 |                                                                | 1.1.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA                                                                                                                                                            | 30.000.000             | 25.800.000             | (4.200.000)               |
|                                                                                 |                                                                | <b>1.2 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>                                                                                                                                         | <b>1.212.393.000</b>   | <b>1.278.089.600</b>   | <b>65.696.600</b>         |
|                                                                                 |                                                                | <b>1.2.1. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b> | <b>1.212.393.000</b>   | <b>1.278.089.600</b>   | <b>65.696.600</b>         |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
|        |         | 1.2.1.1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                                | 5.000.000              | 3.020.000              | (1.980.000)               |
|        |         | 1.2.1.2. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi                                              | 1.207.393.000          | 1.275.069.600          | 67.676.600                |
|        |         | <b>1.3 Program Pengembangan Ekspor</b>                                                                                                                                                      | <b>154.000.000</b>     | <b>106.682.600</b>     | <b>(47.317.400)</b>       |
|        |         | <b>1.3.1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</b> | <b>154.000.000</b>     | <b>106.682.600</b>     | <b>(47.317.400)</b>       |
|        |         | 1.3.1.1. Peningkatan Citra Produk Ekspor                                                                                                                                                    | 154.000.000            | 106.682.600            | (47.317.400)              |
|        |         | <b>1.4 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</b>                                                                                                                                  | <b>302.000.500</b>     | <b>235.043.600</b>     | <b>(66.956.900)</b>       |
|        |         | <b>1.4.1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                            | <b>292.000.500</b>     | <b>227.743.600</b>     | <b>(64.256.900)</b>       |
|        |         | 1.4.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen                                                                                                          | 292.000.500            | 227.743.600            | (64.256.900)              |
|        |         | <b>1.4.2. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                          | <b>10.000.000</b>      | <b>7.300.000</b>       | <b>(2.700.000)</b>        |

| Tujuan | Sasaran                             | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                           | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
|        |                                     | 1.4.2.1. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen | 10.000.000             | 7.300.000              | (2.700.000)               |
|        |                                     | <b>1.5 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>                                                                         | <b>438.000.000</b>     | <b>305.491.400</b>     | <b>(132.508.600)</b>      |
|        |                                     | <b>1.5.1. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>                                                                      | <b>438.000.000</b>     | <b>305.491.400</b>     | <b>(132.508.600)</b>      |
|        |                                     | 1.5.1.1. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                            | 438.000.000            | 305.491.400            | (132.508.600)             |
|        |                                     | <b>Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1</b>                                                                                    | <b>2.136.393.000</b>   | <b>1.951.107.200</b>   | <b>(118.409.300)</b>      |
|        | 2. Meningkatnya industri pengolahan | <b>2.1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang</b>                                                            | <b>1.511.140.100</b>   | <b>1.184.927.800</b>   | <b>(326.212.300)</b>      |
|        |                                     | <b>2.2.1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b>                                                          | <b>1.511.140.100</b>   | <b>1.184.927.800</b>   | <b>(326.212.300)</b>      |
|        |                                     | 2.2.1.1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu                                                                      | 320.294.000            | 224.543.000            | (95.751.000)              |
|        |                                     | 2.2.1.1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh                                                                     | 1.190.846.100          | 960.384.800            | (230.461.300)             |
|        |                                     | <b>2.1.Program Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan</b>                                                                            | <b>9.258.004.700</b>   | <b>6.864.423.000</b>   | <b>(2.591.743.700)</b>    |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
|        |         | <b>2.1.1. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>                                                                                                                                 | <b>9.258.004.700</b>   | <b>6.864.423.000</b>   | <b>(2.591.743.700)</b>    |
|        |         | 2.1.1.1. Pengembangan Industri Kreatif                                                                                                                                                       | 9.258.044.700          | 6.864.423.000          | (2.591.743.700)           |
|        |         | <b>2.2 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>                                                                                                                                      | <b>3.982.322.750</b>   | <b>3.800.560.050</b>   | <b>(181.762.700)</b>      |
|        |         | <b>2.2.1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>                                                                                                      | <b>3.982.322.750</b>   | <b>3.800.560.050</b>   | <b>(181.762.700)</b>      |
|        |         | 2.2.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                          | 221.999.950            | 130.767.650            | (91.232.300)              |
|        |         | 2.2.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                          | 3.422.647.800          | 3.401.317.800          | (21.330.000)              |
|        |         | 2.2.1.3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                                 | 337.675.000            | 268.474.600            | (69.200.000)              |
|        |         | <b>2.3 Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>                                                                                                                                          | <b>10.000.000</b>      | <b>5.740.000</b>       | <b>(4.260.000)</b>        |
|        |         | <b>2.4.1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b> | <b>10.000.000</b>      | <b>5.740.000</b>       | <b>(4.260.000)</b>        |

| Tujuan | Sasaran                                           | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
|        |                                                   | 2.4.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang menjadi kewenangan provinsi                                                 | 10.000.000             | 5.740.000              | (4.260.000)               |
|        |                                                   | <b>2.4 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>                                                                                                                 | <b>80.457.250</b>      | <b>53.936.500</b>      | <b>(26.520.750)</b>       |
|        |                                                   | <b>2.5.1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>                              | <b>80.457.250</b>      | <b>53.936.500</b>      | <b>(26.520.750)</b>       |
|        |                                                   | 2.5.1.1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analiss Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 80.457.250             | 53.936.500             | (26.520.750)              |
|        |                                                   | <b>2.5 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>                                                                                            | <b>160.910.500</b>     | <b>100.088.000</b>     | <b>(60.822.500)</b>       |
|        |                                                   | <b>2.6.1. Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>                                                                                                                                     | <b>160.910.500</b>     | <b>100.088.000</b>     | <b>(60.822.500)</b>       |
|        |                                                   | 2.6.1.1. Implementasi Budaya Pemerintahan DIY                                                                                                                                     | 160.910.500            | 100.088.000            | (60.822.500)              |
|        |                                                   | <b>Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 2</b>                                                                                                                              | <b>24.710409.750</b>   | <b>8.209.115.300</b>   | <b>(3.009559.250)</b>     |
|        | 3. Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan | <b>3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>                                                                                                                 | <b>18.703.506.031</b>  | <b>18.938.881.117</b>  | <b>235.375.086</b>        |

| Tujuan | Sasaran                        | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                           | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
|        | Pemerintah di Perangkat Daerah | <b>3.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>          | <b>308.600.000</b>     | <b>274.727.000</b>     | <b>(33.873.000)</b>       |
|        |                                | 3.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | 10.000.000             | 9.960.000              | (40.000)                  |
|        |                                | 3.1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                             | 5.500.000              | 5.500.000              | -                         |
|        |                                | 3.1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | 293.100.000            | 259.267.000            | (33.833.000)              |
|        |                                | <b>3.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                    | <b>16.268.648.431</b>  | <b>15.934.740.817</b>  | <b>(333.907.614)</b>      |
|        |                                | 3.1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | 16.268196.592.431      | 15.862.684.817         | (333.907.614)             |
|        |                                | 3.1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | 41.296.000             | 41.296.000             | -                         |
|        |                                | 3.1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 20.000.000             | 20.000.000             | -                         |
|        |                                | 3.1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 20.000.000             | 20.000.000             | -                         |
|        |                                | <b>3.1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                    | <b>68.372.900</b>      | <b>63.962.900</b>      | <b>(4.410.000)</b>        |
|        |                                | 3.1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | 68.372.900             | 63.962.900             | (4.410.000)               |
|        |                                | <b>3.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                        | <b>159.982.400</b>     | <b>138.839.400</b>     | <b>(21.143.000)</b>       |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                         | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
|        |         | 3.1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | 4.920.400              | 4.920.400              | -                         |
|        |         | 3.1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 10.325.000             | 10.325.000             | -                         |
|        |         | 3.1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            | 2.281.000              | 2.281.000              | -                         |
|        |         | 3.1.4.4. Penyediaan bahan Logistik Kantor                                             | 5.325.000              | 5.325.000              | -                         |
|        |         | 3.1.4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | 17.615.000             | 17.615.000             | -                         |
|        |         | 3.1.4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | 3.528.000              | 3.528.000              | -                         |
|        |         | 3.1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 114.988.000            | 93.845.000             | (21.143.000)              |
|        |         | 3.1.4.8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | 1.000.000              | 1.000.000              | -                         |
|        |         | <b>3.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>        | <b>88.236.000</b>      | <b>591.246.000</b>     | <b>503.010.000</b>        |
|        |         | 3.1.5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | 80.636.000             | 583.646.000            | 503.010.000               |
|        |         | 3.1.5.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya | 7.600.000              | 7.600.000              | -                         |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                               | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
|        |         | <b>3.1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                            | <b>3.062.259.400</b>   | <b>3.062.253.400</b>   | <b>(6.000)</b>            |
|        |         | 3.1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 1.004.499.400          | 1.004.493.400          | (6.000)                   |
|        |         | 3.1.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 2.057.760.000          | 2.057.760.000          | -                         |
|        |         | <b>3.1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                         | <b>418.298.600</b>     | <b>631.313.300</b>     | <b>(213.014.700)</b>      |
|        |         | 3.1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33.096.000             | 33.093.000             | (3.000)                   |
|        |         | 3.1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 279.722.600            | 282.312.300            | (2.589.700)               |
|        |         | 3.1.7.3. Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | 2.712.000              | 2.712.000              | -                         |
|        |         | 3.1.7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 17.466.000             | 17.466.000             | -                         |
|        |         | 3.1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 59.000.000             | 265.600.000            | (206.600.000)             |
|        |         | 3.1.7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 26.302.000             | 30.130.000             | (3.828.000)               |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                   | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
|        |         | <b>Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 3</b>                            | <b>22.438.611.031</b>  | <b>22.530.643.067</b>  | <b>92.032.036</b>         |
|        |         | <b>3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (BPTTG)</b>       | <b>1.680.131.700</b>   | <b>1.767.441.700</b>   | <b>87.310.000</b>         |
|        |         | <b>3.1.1.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                             | <b>9.240.000</b>       | <b>9.240.000</b>       | <b>-</b>                  |
|        |         | <b>3.1.1.1.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b> | <b>9.240.000</b>       | <b>9.240.000</b>       | <b>-</b>                  |
|        |         | <b>3.1.2.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>             | <b>10.320.000</b>      | <b>8.760.000</b>       | <b>(1.560.000)</b>        |
|        |         | <b>3.1.2.1.Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>                      | <b>10.320.000</b>      | <b>8.760.000</b>       | <b>(1.560.000)</b>        |
|        |         | <b>3.1.3.Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                 | <b>24.730.400</b>      | <b>20.410.400</b>      | <b>(4.320.000)</b>        |
|        |         | <b>3.1.3.1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b> | <b>3.920.400</b>       | <b>3.920.400</b>       | <b>-</b>                  |
|        |         | <b>3.1.3.2.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                     | <b>325.000</b>         | <b>325.000</b>         | <b>-</b>                  |
|        |         | <b>3.1.3.3.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>                                | <b>1.281.000</b>       | <b>1.281.000</b>       | <b>-</b>                  |
|        |         | <b>3.1.3.4.Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>                                 | <b>4.325.000</b>       | <b>4.325.000</b>       | <b>-</b>                  |
|        |         | <b>3.1.3.5.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>                          | <b>4.115.000</b>       | <b>4.115.000</b>       | <b>-</b>                  |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                   | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
|        |         | 3.1.3.6.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                | 1.764.000              | 1.764.000              | -                         |
|        |         | 3.1.3.7.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                    | 9.000.000              | 4.680.000              | (4.320.000)               |
|        |         | <b>3.1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                              | <b>1.584.556.000</b>   | <b>1.584.550.000</b>   | <b>(6.000)</b>            |
|        |         | <b>3.1.4.1.</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 658.900.000            | 658.894.000            | (6.000)                   |
|        |         | <b>3.1.4.2.</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 925.656.000            | 925.656.000            | -                         |
|        |         | <b>3.1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                             | <b>51.285.300</b>      | <b>144.481.300</b>     | <b>93.196.000</b>         |
|        |         | <b>3.1.5.1.</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 37.327.300             | 39.923.300             | 2.596.000                 |
|        |         | <b>3.1.5.2.</b> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 7.578.000              | 7.578.000              | -                         |
|        |         | <b>3.1.5.3.</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | -                      | 90.600.000             | 90.600.000                |
|        |         | <b>3.1.5.4.</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 6.380.000              | 6.380.000              | -                         |
|        |         | <b>3.31.Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>                                                                        | <b>319.575.000</b>     | <b>268.474.600</b>     | <b>(69.200.400)</b>       |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                               | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
|        |         | 3.31.1.Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi            | 319.575.000            | 268.474.600            | (69.200.400)              |
|        |         | 3.31.1.1.Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pembangunan sarana dan Prasarana Industri | 319.575.000            | 268.474.600            | (69.200.400)              |
|        |         | <b>4.1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>      | <b>160.910.500</b>     | <b>100.088.000</b>     | <b>(60.822.500)</b>       |
|        |         | 4.1.1.Peningkatan Budaya Pemerintahan                                                       | 160.910.500            | 100.088.000            | (60.822.500)              |
|        |         | 4.1.1.1.Implementasi Budaya Pemerintahan DIY                                                | 160.910.500            | 100.088.000            | (60.822.500)              |
|        |         | <b>Total Nilai Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis</b>     | <b>2.160.617.200</b>   | <b>2.136.004.300</b>   | <b>(42.712.900)</b>       |

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2025

## 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tujuan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2025**

| No. | Tujuan Perangkat Daerah                | Indikator Kinerja                            | Satuan | Target Tahunan | Triwulan    | Target |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------------|-------------|--------|
| 1.  | Terwujudnya daya saing sektor industri | Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB | %      | 12.20          | Triwulan I  | 11.50  |
|     |                                        |                                              |        |                | Triwulan II | 11.60  |

| No. | Tujuan Perangkat Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan     | Target |
|-----|-------------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|--------|
|     |                         | DIY               |        |                | Triwulan III | 11.70  |
|     |                         |                   |        |                | Triwulan IV  | 12.20  |

Keterangan:

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome

**Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Sasaran Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY  
Tahun 2025**

| No. | Sasaran Strategis                                                           | Indikator Kinerja                               | Satuan   | Target Tahunan | Triwulan     | Target     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|------------|
| 1.  | Meningkatnya industri pengolahan                                            | Laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB | %        | 3.0            | Triwulan I   | 2.15       |
|     |                                                                             |                                                 |          |                | Triwulan II  | 2.3        |
|     |                                                                             |                                                 |          |                | Triwulan III | 2.9        |
|     |                                                                             |                                                 |          |                | Triwulan IV  | 3.0        |
| 2.  | Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri                 | Laju pertumbuhan perdagangan dalam PDRB         | %        | 5.38           | Triwulan I   | 3.0        |
|     |                                                                             |                                                 |          |                | Triwulan II  | 3.3        |
|     |                                                                             |                                                 |          |                | Triwulan III | 4.3        |
|     |                                                                             |                                                 |          |                | Triwulan IV  | 5.38       |
| 3.  | Meningkatnya tatakelola penyelenggara urusan pemerintah di Perangkat Daerah | Kategori RB Perangkat Daerah                    | Kategori | A(85.00)       | Triwulan I   | A (85.00)  |
|     |                                                                             |                                                 |          |                | Triwulan II  | A (85.00)  |
|     |                                                                             |                                                 |          |                | Triwulan III | A (85.00)  |
|     |                                                                             |                                                 |          |                | Triwulan IV  | A (85.00*) |

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

| No | Program Perangkat Daerah                                      | Anggaran             |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (APBD)           | Rp. 3.644.647.750,00 |
| 2. | Program Pengendalian Izin Usaha Industry (APBD)               | Rp. 10.000.000,00    |
| 3. | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (APBD) | Rp. 80.457.250,00    |
| 4. | Program Perijinan dan Pendaftaran                             | Rp. 30.000.000,00    |

|     |                                                                            |                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     | Perusahaan (APBD)                                                          |                       |
| 5.  | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (APBD) | Rp. 1.212.393.000,00  |
| 6.  | Program Pengembangan Ekspor                                                | Rp. 154.000.000,00    |
| 7.  | Program Standarisasi Perlindungan Konsumen (APBD)                          | Rp. 302.000.500,00    |
| 8.  | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (APBD)                | Rp. 438.000.000,00    |
| 9.  | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Ruang (DAIS)              | Rp. 1.511.140.100,00  |
| 10. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan (DAIS)              | Rp. 9.258.044.700     |
| 11. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)               | Rp. 18.556.270.031,00 |
|     | Jumlah Anggaran                                                            | Rp. 35.196.953.331,00 |

#### Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis

| No  | Program Perangkat Daerah                                                                                                              | Anggaran             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 12. | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna/APBD)                                           | Rp. 319.575.000,00   |
| 13. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna/APBD)                                  | Rp. 1.680.131.700,00 |
| 14. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna/DAIS) | Rp. 160.910.500,00   |
|     | Jumlah Anggaran                                                                                                                       | Rp. 2.160.617.200    |

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

Pada tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya Penyelarasan Kinerja dan perubahan anggaran kegiatan dengan telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2025**

| No | Tujuan Perangkat Daerah                   | Indikator Kinerja                                | Satuan | Target Tahunan* | Triwulan     | Target**      |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|---------------|
| 1. | Terwujudnya daya saing sektor industri    | Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB DIY | %      | 11,89-12,20*    | Triwulan I   | 11,89-12,20*  |
|    |                                           |                                                  |        |                 | Triwulan II  | 11,89-12,20*  |
|    |                                           |                                                  |        |                 | Triwulan III | 11,89-12,20*  |
|    |                                           |                                                  |        |                 | Triwulan IV  | 11,89-12,20** |
| 2. | Terwujudnya daya saing sector perdagangan | Kontribusi perdagangan terhadap PDRB DIY         | %      | 8,44*           | Triwulan I   | 8,44          |
|    |                                           |                                                  |        |                 | Triwulan II  | 8,44          |
|    |                                           |                                                  |        |                 | Triwulan III | 8,44          |
|    |                                           |                                                  |        |                 | Triwulan IV  | 8,44**        |

Keterangan:

\* Target Tahunan berdasarkan Berita Acara Penyelarasan Kinerja

**Tabel II.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2025**

| No. | Sasaran Strategis                | Indikator Kinerja                               | Satuan | Target Tahunan* | Triwulan     | Target** |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|----------|
| 1.  | Meningkatnya industry pengolahan | Laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB | %      | 3,7*            | Triwulan I   | 3,7      |
|     |                                  |                                                 |        |                 | Triwulan II  | 3,7      |
|     |                                  |                                                 |        |                 | Triwulan III | 3,7      |
|     |                                  |                                                 |        |                 | Triwulan IV  | 3,7**    |

| No. | Sasaran Strategis                                                           | Indikator Kinerja                       | Satuan   | Target Tahunan* | Triwulan     | Target**   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------|--------------|------------|
| 2.  | Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri                 | Laju pertumbuhan perdagangan dalam PDRB | %        | 5.38*           | Triwulan I   | 5.38       |
|     |                                                                             |                                         |          |                 | Triwulan II  | 5.38       |
|     |                                                                             |                                         |          |                 | Triwulan III | 5.38       |
|     |                                                                             |                                         |          |                 | Triwulan IV  | 5.38**     |
| 3.  | Meningkatnya tatakelola penyelenggara urusan pemerintah di Perangkat Daerah | Kategori RB Perangkat Daerah            | Kategori | A(95,48)*       | Triwulan I   | A(95,48)*  |
|     |                                                                             |                                         |          |                 | Triwulan II  | A(95,48)*  |
|     |                                                                             |                                         |          |                 | Triwulan III | A(95,48)*  |
|     |                                                                             |                                         |          |                 | Triwulan IV  | A(95,48)** |

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

| No | Program Perangkat Daerah                                                   | Anggaran             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (APBD)                        | Rp. 3.532.085.450,00 |
| 2. | Program Pengendalian Izin Usaha Industri (APBD)                            | Rp. 5.740.000,00     |
| 3. | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (APBD)              | Rp. 53.936.500,00    |
| 4. | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (APBD)                        | Rp. 25.800.000,00    |
| 5. | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (APBD) | Rp. 1.278.089.000,00 |
| 6. | Program Pengembangan Ekspor (APBD)                                         | Rp. 106.682.600,00   |
| 7. | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (APBD)                     | Rp. 235.043.600,00   |

|     |                                                                          |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 8.  | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (APBD)              | Rp. 305.491.400,00          |
| 9.  | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (Dais) | Rp. 1.184.927.800,00        |
| 10. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais) | Rp. 7.289.423.000,00        |
| 11. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)             | Rp. 18.938.881.117,00       |
|     | <b>Jumlah Anggaran</b>                                                   | <b>Rp 32.956.101.067,00</b> |

#### Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelayanan Teknis

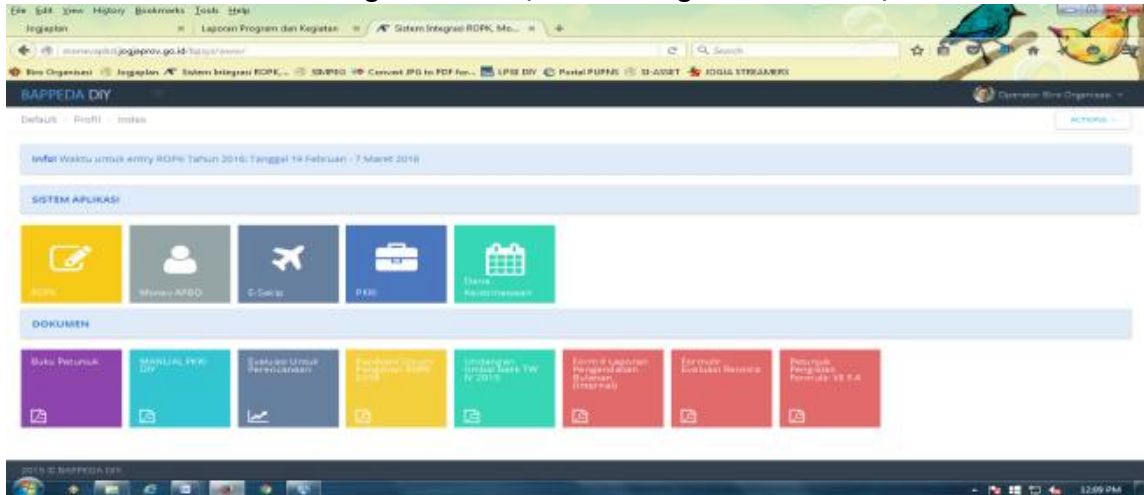
| No  | Program Perangkat Daerah                                                                                                              | Anggaran                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.  | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna/ APBD)                                          | Rp. 268.474.600,00         |
| 2.. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna/ APBD)                                 | Rp. 1.767.441.700,00       |
| 3.  | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna/Dais) | Rp. 100.088.000,00         |
|     | <b>Jumlah Anggaran</b>                                                                                                                | <b>Rp 2.136.004.300,00</b> |

2. \*Target Tahunan berdasarkan Berita Acara Penyelarasan Kinerja
3. \*\* Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

## 2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi [sungguh.jogjaprov.go.id](http://sungguh.jogjaprov.go.id) yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

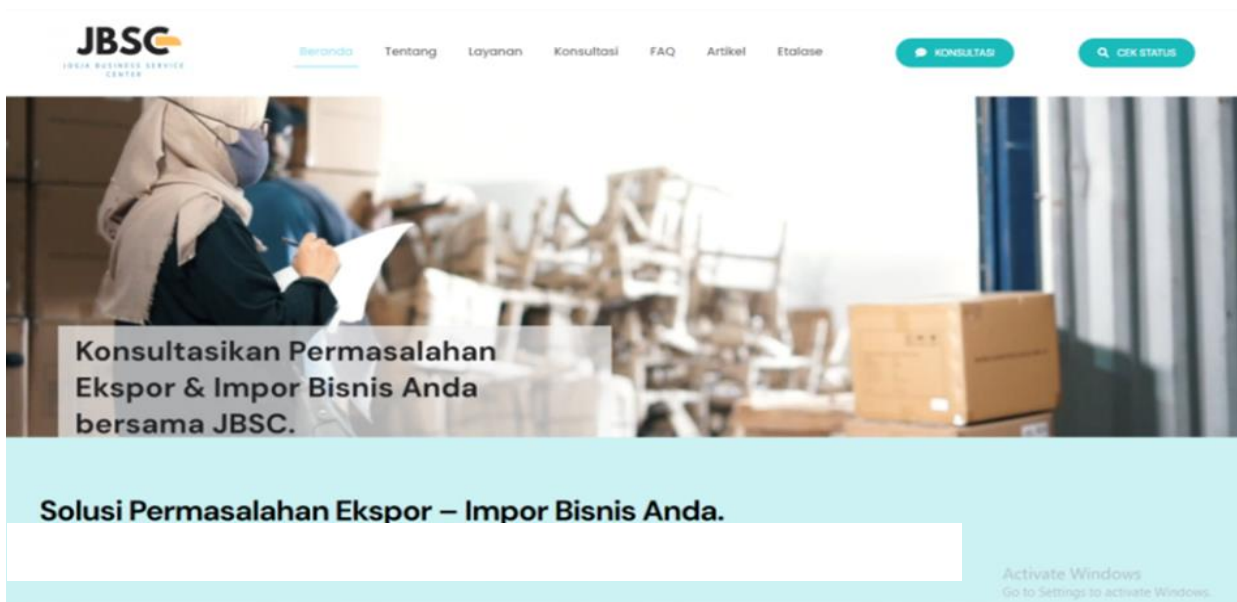
**Gambar 4 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP**



Sumber: <http://sengguh.jogjaprov.go.id/>

2. Layanan Konsultasi terpadu seputar ekspor dan impor di Daerah Istimewa Yogyakarta secara online. Layanan ini menggunakan aplikasi JBSC (*Jogja Business Service Center*). Aplikasi ini merupakan wadah yang memfasilitasi pelaku usaha di DIY untuk berkonsultasi mengenai permasalahan dan kendala terkait ekspor impor dan bisnis secara umum. Perwakilan dari berbagai instansi dilibatkan sebagai operator dan konsultan pada aplikasi ini.

**Gambar 5 Aplikasi JBSC**



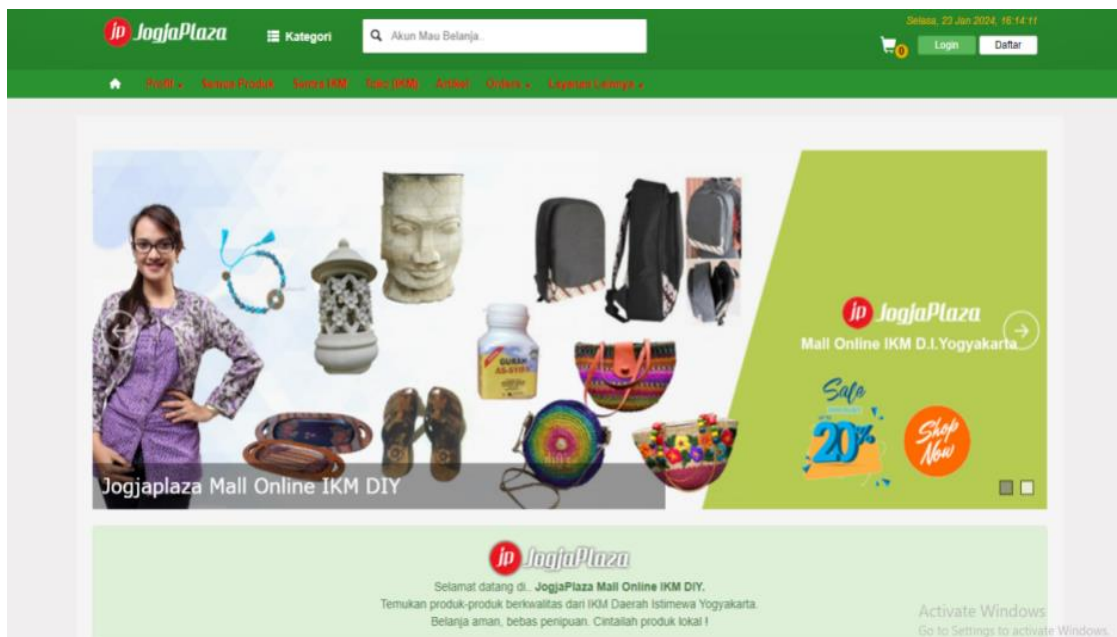
3. Aplikasi Sistem Informasi Konsumen Cerdas (SIKONCER) merupakan layanan pengaduan konsumen secara online.

**Gambar 6 Aplikasi SIKONCER**



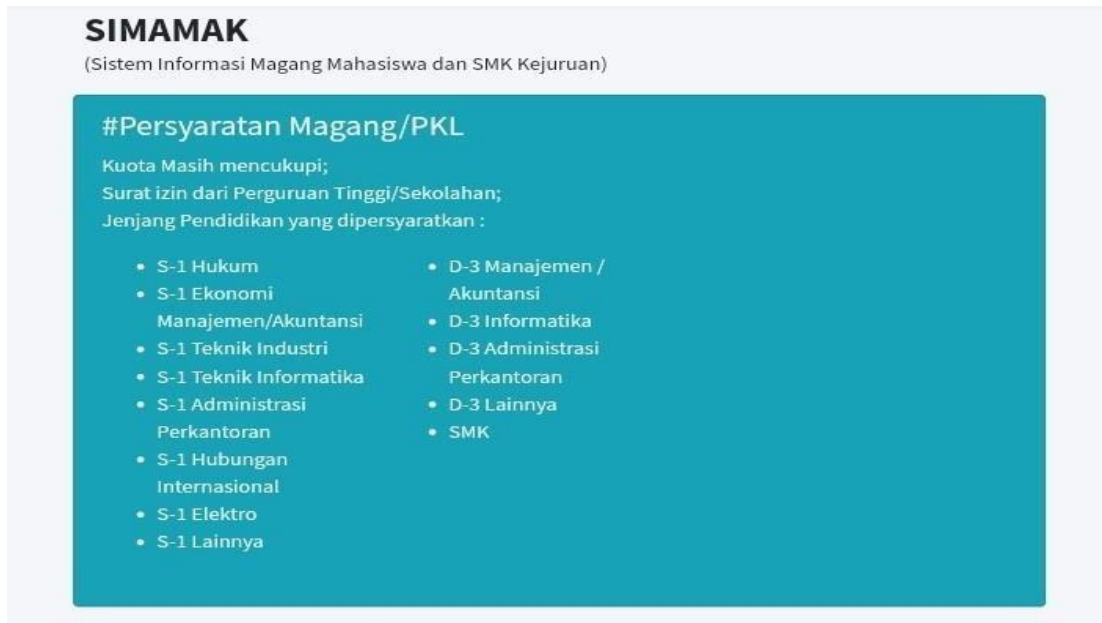
4. Aplikasi Jogjaplaza merupakan aplikasi mall online yang merupakan salah satu bentuk fasilitasi kepada pelaku usaha sektor industri dan perdagangan DIY agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas secara online. Aplikasi ini beralamatkan di <https://jogjaplaza.jogjaprovo.go.id/>

**Gambar 7 Aplikasi Jogjaplaza**



5. Aplikasi SIMAMAK merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY untuk memberi kemudahan bagi mahasiswa atau siswa SMK kejuruan dalam mengajukan permohonan magang atau kerja praktik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Aplikasi ini beralamatkan di <https://disperindag.jogjaprovo.go.id/simamak/>

**Gambar 8 Aplikasi SIMAMAK**



6. Aplikasi E-ARSIP merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk mengelola arsip digital di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Aplikasi ini beralamatkan di <https://disperindag.jogjaprovo.go.id/e-arsip/index.php/login>.

**Gambar 9 Aplikasi E-ARSIP**



## BAB III Akuntabilitas Kinerja

### Bab III berisi :

Capaian Kinerja Tahun 2025  
Capaian Kinerja Lainnya  
Efisiensi Anggaran  
Inovasi  
Lintas Sektor

### 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dengan Bapak Gubernur DIY di tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode        |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1.  | $91 \leq 100$                    | Sangat Baik                          | Hijau Tua   |
| 2.  | $76 \leq 90$                     | Tinggi                               | Hijau Muda  |
| 3.  | $66 \leq 75$                     | Sedang                               | Kuning Tua  |
| 4.  | $51 \leq 65$                     | Rendah                               | Kuning Muda |
| 5.  | $\leq 50$                        | Sangat Rendah                        | Merah       |

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

**Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025**

| No | Tujuan/<br>Sasaran Strategis              | Indikator/Meta Indikator                                                                                                          | Satuan | Base Line 2022 | Realisasi 2024 | Tahun 2025 |           |            |                | Target Akhir RPJMD/ Renstra |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------------------------|
|    |                                           |                                                                                                                                   |        |                |                | Target     | Realisasi | Persentase | Kriteria/ Kode |                             |
| 1  | 2                                         | 3                                                                                                                                 | 4      | 5              | 6              | 7          | 8         | 9          | 10             | 11                          |
| A  | Terwujudnya daya saing sektor perdagangan | Indikator:<br>Kontribusi perdagangan terhadap PDRB DIY<br>Meta Indikator:<br>Distribusi PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan | %      | 8,29           | 8,07           | 8,44       | 8,05      | 95,38      | Sangat Baik    | 8,54                        |

| No | Tujuan/<br>Sasaran<br>Strategis                                               | Indikator/Meta Indikator                                                                                                                                                                                   | Satuan   | Base<br>Line<br>2022 | Realisasi 2024 | Tahun 2025    |              |             |                   | Target<br>Akhir<br>RPJMD/<br>Renstra |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |          |                      |                | Target        | Realisasi    | Persen Tase | Kriteria/<br>Kode |                                      |
| 1  | 2                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5                    | 6              | 7             | 8            | 9           | 10                | 11                                   |
|    |                                                                               | Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Sumber data BPS)                                                                                                                                                  |          |                      |                |               |              |             |                   |                                      |
| 1  | Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri                   | <u>Indikator:</u><br>Laju pertumbuhan perdagangan dalam PDRB<br><u>Meta Indikator:</u><br>Pertumbuhan PDRB Perdagangan atas dasar harga berlaku tahun n dibandingkan dengan n-1 (Sumber data BPS)          | %        | 5,22                 | 3,94           | 5,38          | 5,27         | 97,96       | Sangat Baik       | 5,49                                 |
| B  | Terwujudnya daya saing sektor industri                                        | <u>Indikator:</u><br>Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)<br><u>Meta Indikator:</u><br>Distribusi PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Sumber data BPS)                                             | %        | 12,05                | 11,86          | 11,89 - 12,20 | 11,8         | 96,72       | Sangat Baik       | 12,06 - 12,30                        |
| 1  | Meningkatnya industri pengolahan                                              | <u>Indikator:</u><br>Laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB<br><u>Meta Indikator:</u><br>Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan pada tahun n dibandingkan dengan tahun n-1 (Sumber data BPS) | %        | 0,99                 | 3,63           | 3,70          | 4,37         | 118,11      | Sangat Baik       | 4,10                                 |
| 3  | Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah | <u>Indikator:</u><br>Kategori RB Perangkat Daerah<br><br><u>Meta Indikator:</u><br>Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan capaian indeks RB tahun n dengan predikat Sangat Baik (A)    | kategori | A                    | A<br>(95,47)   | A<br>(95,48)  | A<br>(97,44) | 102,05      | Sangat Baik       | A<br>(95,50)                         |

\* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

#### 1.1.1. Tujuan Perangkat Daerah: Terwujudnya daya saing sektor perdagangan

Kinerja Tujuan “Terwujudnya daya saing sektor perdagangan” diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

**Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

| Tujuan                                    | Indikator                                | Meta Indikator                                                                                                                                           | Penjelasan detail dari Meta Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                         | 2                                        | 3                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Terwujudnya daya saing sektor perdagangan | Kontribusi perdagangan terhadap PDRB DIY | Persentase kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) subsektor perdagangan terhadap total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di DIY pada tahun n | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) subsektor perdagangan pada tahun n dibagi total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) DIY pada tahun n dikalikan 100%. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/ region tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. |

Sumber data: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 2022-2027

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan tujuan Disperindag DIY adalah “Terwujudnya daya saing sektor perdagangan”. Kinerja tujuan tersebut diukur dengan indikator kinerja tujuan berupa “Kontribusi perdagangan terhadap PDRB DIY”.

Kinerja tujuan perdagangan 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025**

| Indikator Tujuan                                                                                                                                                                                        | Realisasi 2024 | 2025    |                                                                                            |                                     | Target Akhir Periode*/ Renstra (2027) | Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                | Target* | Realisasi                                                                                  | % Realisasi                         |                                       |                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                       | 2              | 3       | 4                                                                                          | 5                                   | 6                                     | 7                                         |
| Kontribusi perdagangan terhadap PDRB DIY<br><br><u>Meta Indikator:</u><br>Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Atas Dasar Harga Berlaku | 8,07           | 8,44    | 8,05<br><br>[Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi | 95,38<br><br>[(8,05 / 8,44) x 100%] | 8,54                                  | 94,26                                     |

| Indikator Tujuan         | Realisasi 2024 | 2025    |                                                                                |             | Target Akhir Periode*/ Renstra (2027) | Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%) |
|--------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|                          |                | Target* | Realisasi                                                                      | % Realisasi |                                       |                                           |
| 1                        | 2              | 3       | 4                                                                              | 5           | 6                                     | 7                                         |
| (ADHB) (Sumber data BPS) |                |         | Mobil dan Sepeda Motor Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Triwulan IV Tahun 2025] |             |                                       |                                           |

\* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

Analisis Ketercapaian Tujuan : “Terwujudnya daya saing sektor perdagangan” adalah sebagai berikut:

- Target tahun 2025 sebesar 8,44%; realisasi 8,05%; dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 95,38% (tidak terlampaui).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 8,04%; terdapat kenaikan sebesar 0,01%.
- Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 sebesar 94,26%.

#### Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja

- Banyaknya kegiatan untuk pengendalian inflasi seperti bazaar, pasar murah dan operasi pasar yang berdampak pada peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok yang dilakukan berbagai instansi.
- Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY akan meningkatkan pula pendukung sektor pariwisata, termasuk sektor perdagangan.
- Terbukanya pasar ekspor ke India terutama untuk produk-produk tekstil, minyak atsiri, dan kerajinan.
- Produk unggulan DIY (garment, furniture, sarung tangan, dan kerajinan) masih diminati pasar global.
- Bertambahnya perjanjian Indonesia dengan negara mitra, sehingga preferensi tarif semakin banyak diantaranya: 1) Indonesia - Chile, 2) Indonesia - Uni Emirat Arab, 3) Indonesia - Australia, 4) Indonesia - Australia, dan 5) Indonesia - Hongkong.
- Bergabungnya Indonesia ke dalam skema BRICS yang mendorong kerjasama dengan negara-negara anggota.

- g. Pelaku usaha mampu memenuhi permintaan buyer baik kualitas dan standarisasi produk.
- h. Aturan-aturan perdagangan yg mendukung ekspor dan impor, diantaranya:
  - Permendag yang mengatur kemudahan impor bahan baku produk ekspor khususnya utk kawasan berikat;
  - Penggunaan CEISA 4.0 sehingga eksportir bisa melakukan ekspor secara online;
  - Diperbolehkannya ekspor secara perorangan (tidak harus badan usaha).
- i. Adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang meningkatkan aktivitas penjualan bahan pokok dan bahan penting.
- j. Jaringan konektivitas terhadap aliran logistik yang lebih baik akibat dari pembukaan koridor jalan tol Jogja-Solo-Bawen dan penambahan jalur domestik dan dalam negeri dari Bandara YIA.
- k. Adanya forum koordinasi dan pembinaan ekspor yang dilakukan oleh asosiasi dan stakeholder secara mandiri seperti Panggung Ekspor yang dilaksanakan di Bantul.
- l. Kebijakan Kemenkeu untuk menempatkan uang negara 200 Triliun ke 5 bank mitra dan disalurkan ke unit produktif dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- m. Penandatanganan kerjasama dalam rangka pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Australia (skema CPTPP).
- n. Meningkatnya daya saing perdagangan ekspor akibat skema dumping Amerika Serikat terhadap beberapa negara seperti China.

#### **Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja**

- a. Ekspor produk kayu ke negara tujuan utama ekspor DIY, terutama di Uni Eropa, terkendala oleh pemberlakuan regulasi anti deforestasi (*Europe Union Deforestation Regulation/EUDR*).
- b. Situasi global yang kurang kondusif sehingga pasar ekspor cukup lesu mengakibatkan persaingan kualitas produk inovasi, teknologi, standarisasi, dan lain-lain menjadi lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
- c. Penurunan permintaan ekspor khususnya dari Amerika sebagai negara tujuan utama ekspor DIY disebabkan dampak resesi Amerika dengan menurunnya permintaan barang ekspor seperti pakaian jadi dan tekstil, dimana kedua komoditi tersebut merupakan komoditi yang mendominasi ekspor DIY.
- d. Adanya perang Rusia-Ukraina sehingga terjadi kenaikan harga energi.
- e. Penerapan standarisasi produk maupun aturan barang masuk yg terlalu ketat dari negara pengimpor.
- f. Belum adanya pelabuhan muat ekspor di DIY sehingga menghambat perdagangan, sementara ini pengiriman barang ekspor diantaranya melalui pelabuhan Tanjung Emas.
- g. Menurunnya daya beli masyarakat baik Indonesia maupun di negara tujuan ekspor.
- h. Mahalnya harga transportasi pengiriman/logistik baik pengiriman produk maupun bahan baku dari dan ke Eropa.

- i. Penerapan tarif impor resiprokal di Amerika Serikat yang menyebabkan penurunan ekspor terutama ke negara Amerika Serikat.
- j. Ketegangan antara Iran dan Israel yang berpengaruh terhadap jalur perdagangan terutama negara Timur Tengah sehingga pelaku usaha menahan diri untuk melakukan perdagangan internasional dengan melihat perkembangan lebih lanjut.

### **Analisis Faktor Resiko Ketidackapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/ Pengendalian**

| No | Risiko                                                                 | Penyebab                                                                              | Dampak                                                      | Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Permintaan akan produk DIY menurun                                     | Terjadi resesi baik dalam negeri atau luar negeri                                     | Nilai produksi akan menurun atau tidak sesuai dengan target | Memperluas negara tujuan ekspor                                                                                                                                                                      |
| 2  | Aktivitas perdagangan tidak dapat berjalan dengan baik                 | iklim usaha yang tidak kondusif                                                       | Nilai produksi akan menurun atau tidak sesuai dengan target | Mendorong perluasan pasar baik konvensional maupun online                                                                                                                                            |
| 3  | Pasokan bahan baku terhambat dan proses produksi tidak berjalan lancar | Terjadi kelangkaan Logistik                                                           | Nilai produksi akan menurun atau tidak sesuai dengan target | Sosialisasi pemanfaatan bahan baku lokal                                                                                                                                                             |
| 4  | Proses produksi tidak dapat berjalan lancar                            | Terjadi kelangkaan dan peningkatan harga bahan baku                                   | Nilai produksi akan menurun atau tidak sesuai dengan target | Sosialisasi pemanfaatan bahan baku lokal                                                                                                                                                             |
| 5  | Komoditas tidak tersedia untuk diperjualbelikan                        | Terjadi gagal panen                                                                   | Terjadinya inflasi bahan pokok                              | Impor bahan pokok                                                                                                                                                                                    |
| 6  | Perubahan permintaan komoditi ekspor dan penyediaan bahan baku impor   | Terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim yang mengganggu ekosistem ekspor impor | Volume ekspor menurun                                       | 1.Sosialisasi pemanfaatan bahan baku lokal<br>2. mendorong pelaku usaha untuk selalu membaca dan menelaah kondisi negara tujuan ekspor sehingga dapat mengantisipasi terkait perubahan iklim ekstrim |

Capaian indikator tujuan tersebut didukung oleh kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis, yakni Terwujudnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan daya saing industri.

### 1.1.2. Sasaran 1: Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri

Kinerja sasaran “Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri” diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

**Tabel III.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

| No | Sasaran                                                     | Indikator                               | Meta Indikator                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                           | 3                                       | 4                                                                                                                                                                  |
| 1  | Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri | Laju pertumbuhan perdagangan dalam PDRB | Pertumbuhan PDRB Perdagangan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun n dibandingkan dengan PDRB Perdagangan atas dasar harga konstan (ADHK) n-1<br>(Sumber data BPS) |

Nilai indikator kinerja sasaran diperoleh dari nilai laju pertumbuhan masing-masing lapangan usaha/sektor dalam PDRB DIY tahun 2025 yang dipublikasikan oleh BPS DIY.

Kinerja sasaran “Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri” tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III.6 Target dan Realisasi Kinerja sasaran 1 Tahun 2025**

| No | Indikator Sasaran                                                                                                                                                                                                                          | Realisasi 2024 | 2025   |                                                                                                   |                                     | Target Akhir Renstra (2027) | Capaian s/d 2024 terhadap target 2027 (%) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                            |                | Target | Realisasi                                                                                         | % Realisasi                         |                             |                                           |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3              | 4      | 5                                                                                                 | 6                                   | 7                           | 8                                         |
| 1  | Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB<br><br>Meta Indikator:<br>Pertumbuhan PDRB Perdagangan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun n dibandingkan dengan PDRB Perdagangan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun n-1<br>(Sumber data BPS) | 3,94           | 5,38   | 5,27<br><br>[(pertumbuhan PDRB perdagangan ADHK tahun 2025) / (PDRB perdagangan ADHK tahun 2024)] | 97,96<br><br>[(5,27 / 5,38) x 100%] | 5,49                        | 95,99                                     |

\* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri adalah sebagai berikut:

- Target tahun 2025 sebesar 5,38%; realisasi 5,27%; dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 97,96% (tidak terlampaui).

- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 3,94% terdapat kenaikan sebesar 1,44%.
- c. Capaian target indicator pada tahun 2025 terhadap target 2027 sebesar 95,99%.

Walaupun masih di bawah target yang telah ditetapkan sebelumnya, capaian kinerja sasaran masih berada pada level sangat baik. Secara umum, keberhasilan capaian sasaran 1, dengan Indikator “Laju pertumbuhan perdagangan dalam PDRB” tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel III.7 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1**

| Program                                                                | Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                         | Indikator                                                                                                                                    | Target | Realisasi | % Capaian |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan                        |                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Perusahaan Ekspor                                                                                                                     | 575    | 575       | 100       |
|                                                                        | 1.1. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)                                                        |                                                                                                                                              |        |           |           |
|                                                                        | 1.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal                                                                                              | 27500  | 27500     | 100       |
| 2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting |                                                                                                                                                                                                               | Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting                                                                 |        |           |           |
|                                                                        | 2.1. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan |                                                                                                                                              | 90     | 100       | 90        |
|                                                                        | 2.1.1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | 1      | 1         | 100       |

| Program                                            | Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Indikator                                                                                                                                                         | Target | Realisasi | % Capaian |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|                                                    | 2.1.2. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi                                       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1      | 1         | 100       |
| 3. Program Pengembangan Ekspor                     |                                                                                                                                                                                    | Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru                                                                                             |        |           |           |
|                                                    | 3.1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi |                                                                                                                                                                   |        |           |           |
|                                                    | 3.1.1. Pameran Dagang Internasional/Nasional                                                                                                                                       | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang                                                                                                        | 20     | 20        | 100       |
|                                                    | 3.1.2. Misi dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                                                                                                                                     | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Misi dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                                                                                     | 119    | 119       | 100       |
|                                                    | 3.1.3. Peningkatan Citra Produk Ekspor                                                                                                                                             | Jumlah Produk Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi                                                                                                   | 20     | 20        | 100       |
| 4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen |                                                                                                                                                                                    | Persentase Jumlah Barang Jasa yang Sesuai dengan Standard                                                                                                         |        |           |           |
|                                                    |                                                                                                                                                                                    | Persentase penanganan sengketa konsumen                                                                                                                           | 97     | 100       | 97        |
|                                                    | 4.1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |        |           |           |
|                                                    | 4.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen                                                                                                   | Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani                                                                                                                          | 25     | 25        | 100       |
|                                                    | 4.2. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                          |                                                                                                                                                                   |        |           |           |

|                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |      |      |     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|
|                                                         | 4.2.1. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi                                                                                | 1    | 1    | 100 |
| 5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri |                                                                                                                                       | Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina                                                                                                                              | 2,64 | 3,19 | 7,3 |
|                                                         | 5.1. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                             |                                                                                                                                                                                |      |      |     |
|                                                         | 5.1.1. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                            | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | 5    | 5    | 100 |

Capaian tersebut didukung dari:

a. **Capaian Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**

Indikator program “Jumlah perusahaan ekspor” dengan target 545 perusahaan, tercapai 565 perusahaan atau melampaui target tahun 2024. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan melalui sub kegiatan pelayanan Surat Keterangan Asal.

**Gambar 10 Pelayanan Surat Keterangan Asal**



- b. Capaian Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting  
Indikator program “Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting” dengan target 90%, tercapai 100% atau melampaui target tahun 2024. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diantaranya adalah dengan sub kegiatan berupa pemantauan harga bahan pokok dan bahan penting, operasi pasar serta pasar murah.

**Gambar 11 Pemantauan harga bahan pokok dan bahan penting**



**Gambar 12 Operasi Pasar**



**Gambar 13 Pengawasan Barang Beredar**



- c. Capaian Program Pengembangan ekspor  
Indikator program “Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru” dengan target 20% tercapai 46,2% atau melampaui target tahun 2025. Aktivitas yang mendukung tercapainya program pengembangan ekspor diantaranya Podcast, Misi Dagang dengan eksportir, dan Workshop peningkatan produk ekspor.
- d. Capaian Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Indikator “Persentase jumlah barang jasa yang sesuai dengan standard” dengan target 96%, tercapai 99,94% atau melampaui target tahun 2024. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen diantaranya adalah layanan pengaduan konsumen yang ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa.

**Gambar 14 Sidang BPSK**



- e. Capaian Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Indikator “Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina” dengan target Rp 2,64 Milyar, tercapai Rp 3,19 Milyar atau melampaui target tahun 2025. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri diantaranya adalah Rakerda Dekranasda.

**Gambar 15 Pelatihan Pemasaran Online**



### **Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja**

- a. Banyaknya kegiatan untuk pengendalian inflasi seperti bazar, pasar murah dan operasi pasar yang berdampak pada peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok yang dilakukan berbagai instansi.
- b. peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY akan meningkatkan pula pendukung sektor pariwisata, termasuk sektor perdagangan.
- c. Adanya sinyal positif pada negara tujuan utama ekspor DIY seperti pembukaan ekonomi Tiongkok.
- d. Terbukanya pasar ekspor ke India terutama untuk produk-produk tekstil, minyak atsiri dan kerajinan.
- e. Produk unggulan DIY (garment, furniture, sarung tangan, dan kerajinan) masih diminati pasar global.
- f. Bertambahnya pengrajin Indonesia dengan negara mitra, sehingga preferensi tarif semakin banyak, diantaranya:
  - o Indonesia – Chile
  - o Indonesia - Uni Emirat Arab
  - o Indonesia – Mozambik
  - o Indonesia – Australia
  - o Indonesia – Hongkong
- g. Pelaku usaha mampu memenuhi permintaan buyer baik kualitas dan standarisasi produk
- h. Aturan - aturan perdagangan yang mendukung ekspor dan impor diantaranya:
  - o Permendag yang mengatur kemudahan impor bahan baku produk ekspor khususnya untuk kawasan berikat.
  - o Penggunaan CEISA 4.0 sehingga eksportir bisa melakukan ekspor secara online.
  - o Diperbolehkannya ekspor secara perorangan (tidak harus badan usaha).

### **Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja**

- a. Membuka peluang ekspor ke negara tujuan baru seperti Afrika, Jepang, Australia, dan Timur Tengah, serta meningkatkan pemasaran domestik melalui optimalisasi penjualan barang.
- b. Pembinaan kepada pelaku usaha DIY untuk dapat memasarkan produknya melalui aplikasi daring. Pemanfaatan berbagai platform aplikasi daring dapat dioptimalkan mengingat maraknya trend konsumen menggunakan aplikasi untuk mendapatkan produk yang diinginkan.
- c. Menjamin ketersediaan stok komoditas pokok penting serta kepastian harga yang tidak melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Penyediaan data harga terkini dan informasi stok barang pokok penting sebagai pendukung *early warning*

*system*. Penyelenggaraan Bazar, Pasar Murah, dan operasi pasar dilaksanakan di berbagai tempat terutama mendekati hari besar keagamaan untuk menjamin ketersediaan stok dalam negeri.

- d. Meningkatkan kapasitas IKM dalam pemanfaatan teknologi, inovasi produk, strategi pemasaran, serta standarisasi dan sertifikasi produk untuk meningkatkan daya saing.

#### **Analisis Faktor Risiko Ketidakcapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian**

| No | Risiko                                                                                                                                               | Penyebab                                                               | Dampak                                                                                                                              | Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Potensi Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM dalam Pelaksana Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok sehingga kinerja tidak optima | Sebagian ASN di Unit Kerja yang mengampu ketugasan tersebut pensiun    | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang tidak sepenuhnya terlaksana | 1. Kolaborasi Dinas yang menangani bidang perdagangan di Kabupaten/Kota 2. Memberdayakan pedagang untuk menjadi informan harga sehingga pemantauan harga lebih efisien |
| 2  | Potensi informasi mengenai pelayanan sengketa tidak tersampaikan ke masyarakat                                                                       | kurangnya sosialisasi ke masyarakat                                    | sengketa konsumen tidak tertangani dengan bai                                                                                       | sengketa konsumen tidak tertangani dengan bai                                                                                                                          |
| 3  | Pendamping dalam Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk tidak kompeten                                                                   | Rekrutmen Pendamping yang kurang efektif                               | Pendampingan kurang efektif                                                                                                         | Meminta rekomendasi Pendamping kepada Lembaga yang kompeten                                                                                                            |
| 4  | Potensi Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM dalam Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perusahaan Industri sehingga kinerja tidak optimal   | Jumlah SDM ASN di Unit Kerja yang mengampu ketugasan tersebut terbatas | Monitoring dan Pengawasan Perusahaan Industri tidak sepenuhnya terlaksana                                                           | 1. Kolaborasi Dinas yang menangani bidang perindustrian di Kabupaten/Kot                                                                                               |

|   |                                                                                                                       |                               |                                                                                          |                                                                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5 | Operasional workshop produksi gamelan kurang optima                                                                   | Bahan tidak sesuai standar    | Produk Gamelan tidak sesuai standa                                                       | Pencantuman spesifikasi yang sesuai standar pada dokumen pengadaan |
| 6 | Peralatan dan mesin untuk mendukung Layanan Kemasan (karton, sekunder, tertier, fleksibel, primer, pengalengan) rusak | Peralatan dan mesin sudah tua | Layanan Kemasan (karton, sekunder, tertier, fleksibel, primer, pengalengan) tidak optima | Memaksimalkan pemeliharaan sesuai ketersediaan anggaran            |

### 1.1.3. Tujuan Perangkat Daerah 2: “Terwujudnya daya saing sektor industri”

Kinerja tujuan Terwujudnya daya saing sektor industri diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

**Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Tujuan 2**

| No | Tujuan                                 | Indikator                                        | Meta Indikator                                                   |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                      | 3                                                | 4                                                                |
| 1  | Terwujudnya daya saing sektor industri | Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB DIY | Distribusi PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Sumber: BPS) |

Sumber data diolah dari nilai distribusi PDRB sektor industri pengolahan terhadap PDRB DIY tahun 2025.

Kinerja tujuan Terwujudnya daya saing sektor industri pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut

**Tabel III.9 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan 2**

| No | Indikator Tujuan                                                                                                                                       | Realisasi 2024 | 2025   |                         |                                                    | Target Akhir Renstra (2027) | Capaian s/d 2024 terhadap target 2027(%)           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                        |                | Target | Realisasi               | % Realisasi*                                       |                             |                                                    |
| 1  | 2                                                                                                                                                      | 3              | 4      | 5                       | 6                                                  | 7                           | 8                                                  |
| 1. | Kontribusi industri Pengolahan terhadap PDRB DIY<br><br><u>Meta Indikator:</u><br>Distribusi PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Sumber data BPS) | 8,07%          | 8,44 % | 8,05% (Sumber data BPS) | 95,38% (Angka Realisasi/ Target Tahun 2025 x 100%) | 12,30%                      | 96,10% (Angka Realisasi/ Target Tahun 2027 x 100%) |

Analisis ketercapaian tujuan Terwujudnya daya saing sektor industri adalah sebagai berikut:

- Dari target tahun 2024 sebesar 8,07%, kontribusi sektor industri mencapai 8,44%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 95,38% dengan nilai kriteria sangat baik.
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 8,0482%, terdapat kenaikan sebesar 0,04% dengan kenaikan nilai PDRB sektor industri pengolahan sebesar 487.321 juta rupiah.

- c. Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 sebesar 96,10%.

Capaian indikator tujuan tersebut didukung oleh kinerja 2 (dua) sasaran strategis, yakni Meningkatnya industri pengolahan dan Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah.

#### Analisis Faktor Risiko Ketidackapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian

| No | Risiko                                                                 | Penyebab                                            | Dampak                                                      | Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | Permintaan akan produk DIY menurun                                     | Terjadi resesi baik dalam negeri atau luar negeri   | Nilai produksi akan menurun atau tidak sesuai dengan target | Memperluas negara tujuan ekspor                                     |
| 2  | Aktivitas produksi tidak dapat berjalan dengan baik                    | iklim usaha yang tidak kondus                       | Nilai produksi akan menurun atau tidak sesuai dengan targe  | Penerbitan IOMKI (Ijin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri) |
| 3  | Pasokan bahan baku terhambat dan proses produksi tidak berjalan lancar | Terjadi kelangkaan Logistik                         | Nilai produksi akan menurun atau tidak sesuai dengan targe  | Sosialisasi pemanfaatan bahan baku lokal                            |
| 4  | Proses produksi tidak dapat berjalan lancar                            | Terjadi kelangkaan dan peningkatan harga bahan baku | Nilai produksi akan menurun atau tidak sesuai dengan target | Sosialisasi pemanfaatan bahan baku lokal                            |

#### 1.1.4. Sasaran 2 : Meningkatnya Industri Pengolahan

Kinerja sasaran “Meningkatnya industri pengolahan” diukur dengan indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel III.10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

| No 1 | Sasaran 2                        | Indikator 3                                     | Meta Indikator 4                                                                                         |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Meningkatnya industri pengolahan | Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB | Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan pada tahun n dibandingkan dengan tahun n-1 (Sumber data BPS) |

Kinerja sasaran “Meningkatnya industri pengolahan” pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III.11 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2**

| No | Indikator Sasaran                                                                                                                       | Realisasi 2024 | 2025   |           |              | Target Akhir Renstra (2027) | Capaian s/d 2024 terhadap target 2027 (%) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                         |                | Target | Realisasi | % Realisasi* |                             |                                           |
| 1  | 2                                                                                                                                       | 3              | 4      | 5         | 6            | 7                           | 8                                         |
| 1  | Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB                                                                                         | 11,85          | 11,89  | 11,80     | 99,24        | 12,06                       | 95,93                                     |
|    | <u>Meta</u> Indikator:<br>Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan pada tahun n dibandingkan dengan tahun n-1 (Sumber data BPS) | 3,79           | 3,7    | 4,37      | 118,11       | 4                           | 109,25                                    |

Analisis ketercapaian sasaran 2 “Meningkatnya industri pengolahan” adalah sebagai berikut :

- a) Selama tahun 2025, kinerja sektor industri pengolahan di DIY menunjukkan capaian yang mampu melampaui target yang telah ditetapkan apabila dilihat dari indikator laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB DIY tahun 2025 118,11%. laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB DIY juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 3,94% pada tahun 2024 menjadi 4,37% pada tahun 2025. Peningkatan kinerja sektor ini didukung oleh meningkatnya permintaan terhadap produk ekspor dari industri pengolahan DIY, terbukanya pasar ekspor ke India terutama untuk produk tekstil, minyak atsiri, dan kerajinan, serta adanya program pemerintah pusat yang mendorong pertumbuhan sektor industri, seperti Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri serta Program Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) gratis. Di samping itu, pemanfaatan teknologi produksi yang semakin meningkat, yang ditandai dengan bertambahnya impor barang modal dan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY, turut berkontribusi secara langsung terhadap permintaan produk dari industri pendukung sektor pariwisata, seperti industri makanan dan minuman, kerajinan serta pakaian jadi.
- b) Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar 0,58%

- c) Capaian target indikator terhadap target tahun 2027 sebesar 109,25%
- d) Target tahun 2025 sebesar 5,38%; realisasi 5,27%; dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 97,96% (tidak terlampaui).

Keberhasilan capaian sasaran 2, dengan Indikator “Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB” tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel III.12 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2**

| Program                                                              | Kegiatan/Sub Kegiatan                                                          | Indikator                                                                 | Target        | Realisasi     | % Capaian |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang |                                                                                | Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina                   | 1 sentra      | 1 sentra      | 100       |
|                                                                      | 1.1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten          |                                                                           |               |               |           |
|                                                                      | 1.1.1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu               | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 100       |
| 2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan |                                                                                | Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan                                     | 13,38 Triliun | 14,87 Triliun | 111,14%   |
|                                                                      | 2.1 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                            |                                                                           |               |               |           |
|                                                                      | 2.1.1 Pengadaan Sarana Prasarana                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya                                        | 2 unit        | 2 unit        | 100%      |
|                                                                      | 2.2. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya                            |                                                                           |               |               |           |
|                                                                      | 2.2.1. Pengembangan Industri Kreatif                                           | Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan                                 | 6300 IKM      | 6300 IKM      | 100%      |
| 3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                      |                                                                                | Jumlah tenaga kerja di sektor Industri                                    | 413.500 orang | 373.480 orang | 90,32%    |
|                                                                      |                                                                                | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG                              |               |               |           |
|                                                                      | 3.1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi |                                                                           |               |               |           |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                 |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|
|                                             | 3.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                                                                                                                                                         | 1 dokumen      | 1 dokumen       | 100%    |
|                                             | 3.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                                                                                                                                                         | 1 dokumen      | 1 dokumen       | 100%    |
| 4. Program Pengendalian Izin Usaha Industri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600 perusahaan | 2552 perusahaan | 425,33% |
|                                             | 4.1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                 |         |
|                                             | 4.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang menjadi kewenangan provinsi                                                                                                                                                                     | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 1 dokumen      | 1 dokumen       | 100%    |
|                                             | 4.1.2. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha                                                                                                                                                                                          | 1 dokumen      | 1 dokumen       | 100%    |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |           |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
|                                                                                |                                                                                                                                                                                  | berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA,                        |           |           |      |
| 5. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                      |                                                                                                                                                                                  | Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS                                                                                                                                          |           |           |      |
|                                                                                | 5.1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                       |                                                                                                                                                                                                |           |           |      |
|                                                                                | 5.1.1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| 6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan |                                                                                                                                                                                  | Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik                                                                                                                                         | 60%       | 60%       | 100% |
|                                                                                | 6.1. Peningkatan Budaya Pemerintahan                                                                                                                                             | Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik                                                                                                                                         |           |           |      |

Capaian tersebut didukung dari :

- a) Capaian program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Indikator “Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina” dengan target 1 Sentra, tercapai 1 Sentra atau sesuai dengan target tahun 2025. Aktivitas kegiatan yang mendukung

ketercapaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang diantaranya Pelatihan Diversifikasi Produk, Pelatihan Kemasan, Fasilitas MD, Fasilitas Merk Kolektif, Fasilitas Penerapan GMP, Hibah Mesin/Peralatan Sarana Produksi Bidang Sarana dan Prasarana Industri, Pelatihan Pemasaran Online dan Fasilitas Registrasi Marketplace Internasional.

***Gambar 16 Pelatihan Marketplace Internasional***



- b) Capaian program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Indikator “Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan” dengan target Rp 33.140.998.167, tercapai 30.984.265.633 atau tidak melampaui target 2025. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan diantaranya Revitalisasi Griya Batik, Rehabilitasi Gedung Produksi Kemasan, Pemeliharaan Mesin Boiler Pengemasan Kaleng, Pengadaan Mesin Cetak, Layanan Kemasan, Pengembangan Sentra IKM DIY, Pengembangan Jogja Pusat Fashion Dunia, Jogja Fashion Week, Misi Dagang Belgia, Fasilitas pameran skala ekspor (IFEX, Inacraft, TEI, dan JIFFINA), Pelatihan Ekspor dan Business Matching di Sentra IKM, Pameran Jakarta Fair, Pameran Tetap, Sosialisasi Manajemen Pemasaran Bagi Pelaku Usaha, Festival Batik, Jelajah Sentra IKM, Pendampingan TKDN, Pameran HUT Dekranas, Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Fasilitas Sertifikasi SVLK.

**Gambar 17 Pameran Jiffina**



**Gambar 18 Pameran Inacraft**



- c) Capaian program Perencanaan dan Pembangunan Industri yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub. Kegiatan. Indikator “Jumlah tenaga kerja di sektor industri” dengan target 413.500 orang, tercapai 373.480 orang atau tidak melampaui target tahun 2024. Untuk target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG, dengan target 84%, tercapai 85% atau melebihi target tahun 2024. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri diantaranya Sosialisasi peningkatan pemanfaatan teknologi industri, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk, Pelatihan Manajemen dan Pengelolaan Sentra IKM, Pameran ILF, Pelatihan Prosedur dan Dokumentasi Perdagangan Luar Negeri, Fasilitasi halal, Pendampingan TKDN, Revitalisasi Sentra IKM – PDIN, Podcast Peningkatan Kualitas Produk DIY dengan Teknologi Tepat Guna, Layanan Proses

Bisnis Sentra Kulit UPT Manding, Pelatihan Pengelola dan Operator UPT CFSMI Kulit Manding, Temu Bisnis Pengembangan Potensi Kemitraan, dan Bimtek/ Pelatihan olahan tembakau.

**Gambar 19 Pelatihan Pengelola dan Operator UPT NKJ**



- d) Capaian program Pengendalian Izin Usaha Industri yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Indikator “Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin” dengan target 16.543 Perusahaan, tercapai 23.852 Perusahaan atau melampaui target tahun 2024. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Pengendalian Izin Usaha Industri diantaranya Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian.

**Gambar 20 Pelayanan SKA**



- e) Capaian program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Indikator “Jumlah pelaku usaha industry yang terdaftar di SIINAS” dengan target 700 perusahaan, tercapai 3.023 perusahaan, atau melampaui target 2025. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional diantaranya pemenuhan ATK dalam Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
- f) Capaian program Keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Indikator “Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik” dengan target 60%, tercapai 60% atau sesuai dengan target tahun 2024. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan diantaranya layanan Service Keliling (SIKELING).

#### Faktor Pendukung Keberhasilan

- a) Tumbuhnya permintaan produk ekspor barang industri pengolahan DIY. ekspor barang industri pengolahan periode Januari - Oktober meningkat dari US\$ 386,15 Juta tahun 2023 menjadi US\$ 435,71 Juta di tahun 2024. Komoditi utama: Pakaian Jadi bukan rajutan, Perabot penerangan rumah, Barang-barang rajutan dan Barang-barang dari kulit. Terjadi peningkatan permintaan produk ekspor ke Amerika Serikat, Eropa, dan ASEAN.
- b) Terbukanya pasar ekspor ke India terutama untuk produk-produk tekstil, minyak atsiri, dan kerajinan.
- c) Adanya Program-Program Pemerintah Pusat yang mendorong pertumbuhan sektor industri seperti Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri, Program TKDN IK gratis.
- d) Peningkatan impor bahan baku juga mengalami peningkatan dari tumbuh 56,41% (yoy) menjadi 62,44% (yoy) pada triwulan III 2024.
- e) Peningkatan pemanfaatan teknologi produksi yang ditandai dengan meningkatnya Impor barang modal (mesin dan peralatan lainnya) pada triwulan I 2024 tumbuh 252,65% hal ini tentu berdampak pada produksi TW IV.

- f) Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY akan meningkatkan pula pendukung sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, industri makanan, minuman, dan industri pakaian jadi.
- g) Penyelenggaraan pilkada yang berdampak pada permintaan produk industri pendukungnya.

#### Faktor Penghambat Keberhasilan

- a) Maraknya impor ilegal yang menjadi pesaing dan mematikan industri lokal termasuk di DIY. Menurut Menkopolkam Budi Gunawan, dalam 4 tahun terakhir total transaksi penyelundupan kurang lebih mencapai Rp 216 triliun (sumber CNBC Indonesia).
- b) Meningkatnya impor produk legal yang tentu saja akan menjadi pesaing dan mematikan industri lokal termasuk di DIY. Menurut asosiasi pengusaha, hal ini diantaranya disebabkan karena kemudahan impor akibat kebijakan pemerintah pusat tentang relaxsasi impor (Permendag no 8 tahun 2024). Impor produk tertentu yang semula harus dengan pertimbangan teknis kementerian perindustrian agar tidak mengganggu industri nasional, sekarang tidak harus dengan pertimbangan teknis tersebut.
- c) Ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlanjut menyebabkan naiknya harga energi dan minyak dunia. Hal ini menyebabkan mahalnya harga bahan baku impor. Imbasnya terhadap para pelaku usaha industri yang menggunakan bahan baku impor kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.
- d) Penerapan standarisasi produk maupun aturan barang masuk yg terlalu ketat dari negara pengimpor seperti diberlakukannya EUDR di negara-negara Eropa.
- e) Pemanfaatan teknologi produksi yang masih perlu ditingkatkan.

#### **Analisis Faktor Risiko Ketidackapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian**

| No | Risiko                                                                                                                                             | Penyebab                                                               | Dampak                                                                               | Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Peserta Pelatihan Diversifikasi Produk tidak hadir                                                                                                 | Komitmen peserta kurang                                                | Tidak semua peserta mendapatkan peningkatan keterampilan                             | Meningkatkan koordinasi dan mengkonfirmasi peserta                                                                               |
| 2  | Potensi minat masyarakat rendah                                                                                                                    | kurangnya publikasi                                                    | Informasi Perijinan Industri tidak tersampaikan dengan optimal ke peserta/masyarakat | Mengundang Masyarakat untuk mengikuti Sosialisasi Pelayanan perijinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI |
| 3  | Potensi Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM dalam Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perusahaan Industri sehingga kinerja tidak optimal | Jumlah SDM ASN di Unit Kerja yang mengampu ketugasan tersebut terbatas | Monitoring dan Pengawasan Perusahaan Industri tidak sepenuhnya terlaksana            | Kolaborasi Dinas yang menangani bidang perindustrian di Kabupaten/Kota                                                           |

#### 1.1.4. Sasaran 3: “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah”

Tolok ukur capaian sasaran “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah” sebagaimana indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3**

| No<br>1 | Sasaran<br>2                                                                  | Indikator<br>3               | Meta Indikator<br>4                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1       | Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah | Kategori RB Perangkat Daerah | Nilai Kategori Reformasi Birokrasi |

**Tabel III.14 Skema dan bobot nilai Evaluasi Reformasi Perangkat Daerah**

| No                              | Uraian                                                                                 | Bobot | Keterangan   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| I. Reformasi Birokrasi General  |                                                                                        |       |              |
| A                               | Strategi Pelaksanaan RB General                                                        | 10    | 1 indikator  |
| B                               | Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB                                                       | 40    |              |
|                                 | Sasaran 1 : Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif       | 32    | 12 indikator |
|                                 | Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional                     | 8     | 2 indikator  |
| C                               | Capaian sasaran Strategis RB                                                           | 50    |              |
|                                 | Sasaran 1 : Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif       | 28    | 4 indikator  |
|                                 | Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional                     | 22    | 3 indikator  |
| Total RB General                |                                                                                        | 100   |              |
| II. Reformasi Birokrasi Tematik |                                                                                        |       |              |
| A                               | Capaian Evaluasi RB Tematik Pengentasan Kemiskinan                                     | 5     | 5 indikator  |
| B                               | Capaian Evaluasi RB Tematik Peningkatan Investasi                                      | 5     | 2 indikator  |
| C                               | Capaian Evaluasi RB Tematik Pengendalian Inflasi                                       | 5     | 3 indikator  |
| D                               | Capaian Evaluasi RB Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri                             | 5     | 1 indikator  |
| E                               | Capaian Evaluasi RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan ( <i>Stunting</i> ) | 5     | 5 indikator  |
| Total RB Tematik                |                                                                                        | 20    |              |
| Total Nilai RB                  |                                                                                        | 120   |              |

Sumber data: Dins Perindustrian dan Perdagangan DIY

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut

**Tabel III.15 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025**

| N<br>o           | Unit Kerja                                    | Nilai<br>Total<br>RB<br>General<br>2025 | Nilai<br>Total<br>RB<br>Tematik<br>2025 | INDEKS<br>RB<br>2025 | Kategori | Predikat  | Nilai<br>Total<br>RB<br>General<br>2024 | Nilai<br>Total<br>RB<br>Tematik<br>2024 | INDEKS<br>RB<br>2024 | GAP         |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------|
| 14               | Dinas<br>Perindustrian dan<br>Perdagangan DIY | 82,98                                   | 14,46                                   | 97,44                | A        | Memuaskan | 84,07                                   | 11,40                                   | 95,47                | 1,98        |
| <b>Rata-Rata</b> |                                               | <b>82,98</b>                            | <b>14,46</b>                            | <b>97,44</b>         |          |           | <b>84,071</b>                           | <b>11,40</b>                            | <b>95,67</b>         | <b>1,98</b> |

Sumber data:Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Januari 2026

**Tabel III.16 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2025 berdasar PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi**

| No | Kriteri<br>a | Nilai/<br>Angka | Predikat                           | Interpretasi                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | AA           | > 100           | Sangat<br>Memuask<br>an            | Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK                                                                                  |
| 2  | A            | >80 -<br>100    | Memuask<br>an                      | Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan                                                            |
|    | A-           |                 | Memuask<br>an<br>dengan<br>Catatan | Memenuhi sebagian besarkriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan           |
| 3  | BB           | >70 -<br>80     | Sangat<br>Baik                     | Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan                     |
| 4  | B            | >60 -<br>70     | Baik                               | Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. |
| 5  | CC           | >50 -<br>60     | Cukup                              | Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing                                                                            |

| No | Kriteria | Nilai/<br>Angka | Predikat      | Interpretasi                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | C        | >30 - 50        | Kurang        | RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing |
| 7  | D        | 0 -30           | Sangat Kurang | RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK                                                                                 |

Sumber data: PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

Kinerja sasaran Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III.17 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

| Indikator Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Realisasi 2024 | 2025      |           |             | Target Akhir Periode*/ Renstra (2027) | Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Target*   | Realisasi | % Realisasi |                                       |                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2              | 3         | 4         | 5           | 6                                     | 7                                         |
| Kategori RB Perangkat Daerah<br>Meta Indikator:<br>Nilai Kategori Reformasi Birokrasi<br><br><u>Meta Indikator :</u><br><br>Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun-n<br><br><u>Penjelasan detail dari Meta Indikator:</u><br>Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.<br>Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan :<br>1. Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah<br>2. Reformasi Birokrasi Tematik | A (95,47)      | A (95,48) | A (97,44) | 102,05%     | A (95,50)                             | 102,03%                                   |

| Indikator Sasaran | Realisasi 2024 | 2025    |           |             | Target Akhir Periode*/ Renstra (2027) | Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%) |
|-------------------|----------------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|                   |                | Target* | Realisasi | % Realisasi |                                       |                                           |
| 1                 | 2              | 3       | 4         | 5           | 6                                     | 7                                         |
| Perangkat Daerah  |                |         |           |             |                                       |                                           |

\* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

### Analisis ketercapaian Sasaran 3: “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah”

- Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 mencapai nilai 97,44 dengan predikat Memuaskan (A), dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 102,05% (terlampai).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 95,47 dengan predikat sangat memuaskan (A) terdapat kenaikan nilai sebesar 1,97.
- Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 sebesar 102,03%.

Keberhasilan capaian Sasaran 3, dengan Indikator Kategori RB Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel III.18 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3**

| Program                                                  | Kegiatan/Sub Kegiatan                                                 | Indikator                                                                        | Target    | Realisasi | % Capaian |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi |                                                                       | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                            | 100       | 90,32     | 90,32%    |
|                                                          | 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                  |           |           |           |
|                                                          | 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100%      |
|                                                          | 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                             | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100%      |
|                                                          | 1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 3 Laporan | 3 Laporan | 100%      |

|  |                                                                                       |                                                                                                                                                    |                  |                   |      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------|
|  | 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                           |                                                                                                                                                    |                  |                   |      |
|  | 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 124 Orang/ Bulan | 124 Orang / Bulan | 100% |
|  | 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 12 Dokumen       | 12 Dokumen        | 100% |
|  | 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan        | 1 Laporan         | 100% |
|  | 1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 18 Laporan       | 18 Laporan        | 100% |
|  | 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                           |                                                                                                                                                    |                  |                   |      |
|  | 1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 13 Laporan       | 13 Laporan        | 100% |
|  | 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                               |                                                                                                                                                    |                  |                   |      |
|  | 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 17 Paket         | 17 Paket          | 100% |
|  | 1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket          | 1 Paket           | 100% |
|  | 1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                              | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                | 1 Paket          | 1 Paket           | 100% |
|  | 1.4.4. Penyediaan bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 4 Paket          | 4 Paket           | 100% |
|  | 1.4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | 21 Paket         | 21 Paket          | 100% |
|  | 1.4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                       | 2 Dokumen        | 2 Dokumen         | 100% |
|  | 1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 1 Laporan        | 1 Laporan         | 100% |

|  |                                                                                                                           |                                                                                                        |           |           |      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
|  | 1.4.8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
|  | 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                     |                                                                                                        |           |           |      |
|  | 1.5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 13 unit   | 13 unit   | 100% |
|  | 1.5.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan              | 1 unit    | 1 unit    | 100% |
|  | 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                   |                                                                                                        |           |           |      |
|  | 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan | 3 Laporan | 100% |
|  | 1.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan | 4 Laporan | 100% |
|  | 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                                                                                                        |           |           |      |
|  | 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 unit    | 1 unit    | 100% |
|  | 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 28 unit   | 28 unit   | 100% |
|  | 1.7.3. Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 3 unit    | 3 unit    | 100% |
|  | 1.7.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 19 unit   | 19 unit   | 100% |
|  | 1.7.5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 unit    | 2 unit    | 100% |
|  | 1.7.6. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 19 unit   | 19 unit   | 100% |

Capaian tersebut didukung dari capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang terdiri dari 7 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Dari Indikator “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” dengan target skor 100 tercapai skor 90,32 atau tidak melampaui target skor tahun 2024. Instrumen pendukung capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu aplikasi Sengguh (Sistem

Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah) yang dapat diakses melalui <http://sungguh.jogjaprovo.go.id>. Sungguh membantu melaksanakan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja (sasaran hingga sub kegiatan) organisasi perangkat daerah. Penilaian kinerja setiap sub kegiatan organisasi perangkat daerah terdapat pada menu PKKI.

#### **Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja**

- a. Adanya sarana prasarana teknologi pendukung seperti SIPD, Jogja Plan, Sungguh, E-Lapor, SIPPN, core reform space, Srikandi, Kenes

#### **Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja**

- a. Banyak ASN yang pensiun
- b. Sarana prasarana pendukung (seperti komputer, laptop, kendaraan) belum sebanding dengan jumlah kegiatan
- c. SIPD masih dalam tahap pengembangan sehingga masih sering terjadi error

### **3.2. Capaian Kinerja Lainnya**

Tujuan Pembangunan berkelanjutan /*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) memberikan landasan kokoh dan merupakan instrumen utama untuk mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pergub DIY no 78 tahun 2023, Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY berkontribusi terhadap Tujuan tahap 1 tanpa Kemiskinan dengan indikator Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Berikut ini kontribusi pada pencapaian sasaran TPB/SDGs sebagai berikut:

**Tabel III.19 Kontribusi Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY terhadap Capaian TPB/SDGs Pemerintah Daerah**

| No | Tujuan SDGs      | Indikator                                                                                                  | Target | Realisasi | Program Perangkat Daerah                                            | Indikator Program PD                                                         | Target | Realisasi | %Realisasi |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 1  | Tanpa Kemiskinan | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur | 9,66%  | 10,08% *) | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | 90%    | 100%      | 111,11%    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |     |        |                                                                             |                                                         |                   |                   |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 2 | Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB | 13% | 11,80% | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang           | Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina | 2 Sentra          | 2 Sentra          | 100%    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur                      | 4%  | 4,37%  | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan           | Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan                   | Rp 13,78 Triliun  | Rp 15,97 Triliun  | 115,89% |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur          | 14% | 16,42% | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                                | Jumlah tenaga kerja di sektor Industri                  | 414.000 Orang     | 396.540 Orang     | 95,78%  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |     |        | Program Pengendalian Izin Usaha Industri                                    | Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin                 | 17.043 Perusahaan | 27.501 Perusahaan | 161,36% |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |     |        | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                      | Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS   | 700 Perusahaan    | 3023 Perusahaan   | 431,86% |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |     |        | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik  | 75%               | 75%               | 100%    |

|  |                                                                                                                                                                                         |                                    |                              |                 |                                              |                                                                       |                |                |          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
|  | Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020 | Pertumbuhan ekspor produk nonmigas | 539,96 sd 797,72<br>Juta USD | 558,72 juta USD | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan | Jumlah Perusahaan Ekspor                                              | 575 Perusahaan | 575 Perusahaan | 115,89 % |
|  |                                                                                                                                                                                         |                                    |                              |                 | Program Pengembangan Ekspor                  | Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru | 20%            | 25%            | 125%     |

Penjelasan :

1. Tujuan tanpa kemiskinan yang diukur dengan Indikator “Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur” dipengaruhi oleh Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan indikator “Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting” dengan realisasi sebesar 10,08% dari target yang telah ditetapkan sebesar 9,66%. Realisasi Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi dengan realisasi pelaksanaan pasar murah sebanyak 37 kali dan operasi pasar sebanyak 8 kali.
2. Tujuan mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang yang diukur dengan Indikator “Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB, Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur, dan Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur” dan dipengaruhi oleh Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dengan realisasi sebesar 100%, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan realisasi 4,37%, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan realisasi 16,42%, Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan realisasi 144,18%, Program Pengelolaan

Sistem Informasi Industri Nasional dengan realisasi 425,33%, dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan realisasi 100%.

3. Tujuan secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020 yang diukur dengan Indikator “Pertumbuhan ekspor produk nonmigas” dan dipengaruhi oleh Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dengan realisasi sebesar 558,72 USD dan Program Pengembangan Ekspor dengan realisasi 125%.

**b. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemda DIY dan Program Pemda DIY**

Sebagaimana amanat cascading kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program Pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel III.20 Kontribusi Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah DIY**

| No | Sasaran Pemerintah Daerah      | Indikator Pemerintah Daerah    | Target | Realisasi | Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah                                                | Indikator                                           | Target | Realisasi |
|----|--------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1. | Penghidupan ekonomi yang layak | Angka Pertumbuhan Ekonomi PDRB | 5,3%   | 5,49%     |                                                                                |                                                     |        |           |
|    |                                |                                |        |           | Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri                    | Laju pertumbuhan perdagangan dalam PDRB DIY         | 5,38%  | 35,27%    |
|    |                                |                                |        |           | Meningkatnya Industri Pengolahan                                               | Laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB DIY | 3,7%   | 4,37%     |
|    |                                |                                |        |           | Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah | Kategori RB Perangkat Daerah                        | A      | A         |

Penjelasan:

1. Penghidupan ekonomi yang layak di ukur menggunakan 4 (empat) indikator yaitu Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB, Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi.
2. Angka pertumbuhan ekonomi diantaranya sangat dipengaruhi nilai pertumbuhan PDRB sektor unggulan seperti sektor pertanian, industri pengolahan dan akomodasi makan minum. Sebagai salah satu sektor yang berpengaruh, pertumbuhan ekonomi industri pengolahan sangat dipengaruhi oleh nilai perdagangan (baik dalam negeri maupun luar negeri), nilai industri pengolahan, serta kualitas tata kelola pemerintahan pada level perangkat daerah.
3. Dinas perindustrian dan Perdagangan sebagai perangkat daerah yang memiliki ketugasan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan memiliki peran dalam membina pelaku usaha industri dan perdagangan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan nilai perdagangan yang tergambarkan pada Laju pertumbuhan perdagangan dalam PDRB DIY Tahun 2025, serta meningkatkan industri pengolahan yang tergambarkan pada Laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB DIY Tahun 2025.
4. Sebagai perangkat daerah mandiri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY juga diukur keberhasilan capaiannya melalui sasaran “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah” dengan Indikator “Kategori RB Perangkat Daerah.

**Tabel III.21 Kontribusi Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah DIY**

| No | Program Pemerintah Daerah            | Indikator Program Pemerintah Daerah                                              | Target | Realisasi | Program Perangkat Daerah                                          | Indikator Program PD                                      | Target   | Realisasi | %Realisasi |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 1  | Program Pengembangan Sektor Unggulan | Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum | 3,4%   | 5,68%     | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang | Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibangun | 2 Sentra | 2 Sentra  | 100%       |



|   |                                                  |                                                        |                   |      |                                                |                                                           |       |        |          |
|---|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
| 2 | Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br><br>Indeks SPBE | 87,76<br><br>3,12 | 4,53 |                                                | menjadi eksportir baru                                    |       |        |          |
|   |                                                  |                                                        |                   |      | Program StandardisasiDan Perlindungan Konsumen | Persentase Jumlah Barang Jasa yang Sesuai dengan Standard | 96,5% | 96,5%  | 100 %    |
|   |                                                  |                                                        |                   |      | Program Penunjang Urusan Pemerintah            | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerinta             | 85%   | 91,85% | 108,86 % |

### Penjelasan :

1. Pengembangan sector unggulan yang diukur dengan Indikator “Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum”; dipengaruhi oleh Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dengan indikator “Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina”, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator “Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan”, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan Indikator “Jumlah tenaga kerja di sektor industri”, Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan indikator “Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin”; Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan Indikator “Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS; Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan Indikator “Jumlah perusahaan ekspor”, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan Indikator “Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting”, Program Pengembangan Ekspor dengan Indikator “Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru”, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan Indikator “Persentase jumlah barang jasa yang sesuai dengan standard”, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan Indikator “Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina”.
2. Sinergitas Tatakelola pemerintahan daerah yang diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks SPBE, dipengaruhi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Indikator “Nilai PKKI program penunjang urusan pemerintah daerah”.

### 3.3. Analisis Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III.22 Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran Belanja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025**

| No                               | Tujuan/<br>Sasaran                                                            | Indikator                                        | Kinerja |           |             | Anggaran       |                |             | Efisiensi (Rp) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                  |                                                                               |                                                  | Target  | Realisasi | % Realisasi | Target (Rp)    | Realisasi (Rp) | % Realisasi |                |
| 1                                | 2                                                                             | 3                                                | 4       | 5         | 6           | 7              | 8              | 9           | 10             |
| A                                | Terwujudnya daya saing sektor perdagangan                                     | Kontribusi perdagangan terhadap PDRB DIY         | 8,44%   | 8,05%     | 95,38       | 1,951,107,200  | 1,935,347,757  | 99,19       | 15,759,443     |
| 1                                | Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri                   | Laju pertumbuhan perdagangan dalam PDRB          | 5,38%   | 5,27%     | 97,96       | 1,951,107,200  | 1,935,347,757  | 99,19       | 15,759,443     |
| B                                | Terwujudnya daya saing sektor industri                                        | Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB DIY | 3,7%    | 4,37%     | 118,11      | 33,255,986,167 | 31.078.110.633 | 87,56       | 2,177,875,534  |
| 1                                | Meningkatnya industri pengolahan                                              | Laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB  | 2,50%   | 3,63%     | 145,20      | 33,140,998,167 | 30,984,265,633 | 93,49       | 2,156,732,534  |
| 2                                | Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah | Kategori RB Perangkat Daerah                     | A (85)  | A (85)    | 100         | 114,988,000    | 93,845,000     | 81,62       | 21,143,000     |
| <b>Jumlah</b>                    |                                                                               |                                                  |         |           |             | 35.207.093.367 | 33.013.458.390 | 93,38%      | 2,193,634,977  |
| <b>Total Belanja Operasional</b> |                                                                               |                                                  |         |           |             | 35,207,093,367 | 33,013,458,390 | 93,38%      | 2,193,634,977  |

Sumber: <http://sungguh.jogjapro.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2025, Laporan Keuangan Dinas Perindustriandan Perdagangan DIY Tahun 2025

### **3.4. Inovasi**

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian kinerja antara lain:

- a. Layanan konsultasi online melalui aplikasi Jogja Business Service Centre (JBSC)
- b. Layanan aduan konsumen secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Konsumen Cerdas (SIKONCER)
- c. Aplikasi SIMAMAK untuk memberi kemudahan kemudahan bagi mahasiswa atau siswa SMK kejuruan dalam mengajukan permohonan magang atau kerja praktik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.
- d. SAVING-BATUBEKAS (Solusi Aman dan Efisien untuk Menyimpan Batu Gerinda Bekas dengan Mudah) pada Workshop Gamelan.
- e. Pasar murah merangkul Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Perbankan.
- f. Peningkatan intensitas koordinasi dengan ATASE Perdagangan Brussel.
- g. Inisiasi pemanfaatan hasil penelitian BRIN dan hasil penelitian mahasiswa untuk mendukung *evidence based policy* sektor industri dan perdagangan.
- h. Modifikasi Mobil untuk memperlancar layanan Si Keling dan Kolaborasi Lintas Bidang Balai dalam Pelaksanaan Kegiatan SIKELING.

### **3.5. Lintas Sektor**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan di tengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

**Tabel III.23 Inventarisasi Lintas Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY**

| NO | KEGIATAN LINTAS SEKTOR                                | KONTRIBUSI PARA PIHAK                                                                                                                                                       |                                                                                                        | OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN                                                                         |                                              | MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       | PIHAK                                                                                                                                                                       | KONTRIBUSI                                                                                             | KELUARAN                                                                                            | KELOMPOK SASARAN                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. | Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) | Disperindag DIY                                                                                                                                                             | Ketua Harian Tim P3DN DIY, melakukan monitoring dan evaluasi implementasi P3DN di Pemda DIY            | Pembinaan penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara terintegrasi | 1. OPD Pemda DIY<br>2. Pelaku Usaha Industri | <p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri</li> <li>2. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Industri Pengolahan</li> <li>3. Mendukung pencapaian kinerja Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Pengembangan Industri Kreatif, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</li> </ol> <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan tujuan Program P3DN</li> <li>2. Mendapatkan pembinaan yang terintegrasi yang berdampak pada peningkatan penggunaan produk dalam negeri di DIY</li> </ol> |
|    |                                                       | Sekda DIY, Asekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan                                                                                                                       | Memberikan pengarahannya terkait implementasi P3DN di Pemda DIY                                        |                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                       | Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Inspektorat DIY, Bappeda DIY, BPKA DIY, DPPM DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Biro Hukum Setda DIY, dan BLP DIY | Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi P3DN di Pemda DIY                                       |                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                       | BPIWP2 Setda DIY, Dinas PUP ESDM DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dinas Pertanian dan Ketahanan                                                                       | Memberikan penafsiran apabila ada perbedaan pendapat mengenai penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri |                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| NO | KEGIATAN LINTAS SEKTOR                                        | KONTRIBUSI PARA PIHAK                                |                                                                                                                                                                                                               | OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN          |                           | MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                               | PIHAK                                                | KONTRIBUSI                                                                                                                                                                                                    | KELUARAN                             | KELOMPOK SASARAN          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                               | Pangan DIY, Dinas Perhubungan DIY                    |                                                                                                                                                                                                               |                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                               | Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)       | Konsultasi, Koordinasi                                                                                                                                                                                        |                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                               | Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), KADIN DIY | Edukasi, pengawasan, memberikan penafsiran apabila ada perbedaan pendapat mengenai penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri                                                                                   |                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                               | Pelaku Usaha                                         | Memberikan masukan berupa permasalahan dan berbagai kendala dalam menyediakan barang/jasa pada e-katalog lokal sebagai bahan pembinaan                                                                        |                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. | Peningkatan Ekspor Impor DIY melalui Kolaborasi Lintas Sektor | Disperindag DIY                                      | Melakukan pembinaan IKM Ekspor Impor DIY dari sisi peningkatan kualitas dan kuantitas produk, sertifikasi, fasilitasi promosi, penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan peningkatan kapasitas pelaku ekspor | Pembinaan ekspor secara terintegrasi | Pelaku Usaha Ekspor Impor | <p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Perdagangan</li> <li>2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Ekspor</li> </ol> <p>Bagi Kelompok Sasaran:<br/>Mendapatkan pembinaan yang terintegrasi yang berdampak pada peningkatan usaha ekspor impornya</p> |
|    |                                                               | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                 | Melakukan pembinaan pelaku usaha pertanian dalam menyediakan bahan baku produksi produk ekspor dan menyediakan produk pertanian kualitas ekspor                                                               |                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| NO | KEGIATAN LINTAS SEKTOR                                                  | KONTRIBUSI PARA PIHAK |                                                                                                                                                         | OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN       |                     | MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                         | PIHAK                 | KONTRIBUSI                                                                                                                                              | KELUARAN                          | KELOMPOK SASARAN    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                         | DPPM                  | Pembinaan berkaitan dengan perijinan bagi pelaku usaha ekspor impor                                                                                     |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                         | Balai Karantina       | Pembinaan berkaitan ekspor impor produk tanaman dan hewan                                                                                               |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                         | OPD Lainnya           | Melakukan pembinaan terkait ekspor impor sesuai dengan kewenangannya                                                                                    |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                         | Pelaku Ekspor Impor   | Memberikan masukan berupa permasalahan dan berbagai kendala dalam menjalankan usaha ekspor impor sebagai bahan pembinaan                                |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. | Forum Komunikasi dan Konsultasi Ekspor Impor Daerah Istimewa Yogyakarta | Disperindag DIY       | Admin dan konsultan permasalahan bisnis di bidang pemasaran, produksi, pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna dan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) | Layanan komunikasi dan Konsultasi | Pelaku Usaha di DIY | <p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Perdagangan</li> <li>2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Ekspor, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri serta Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</li> </ol> <p>Bagi Kelompok Sasaran:<br/>Peningkatan pengetahuan manajemen usaha</p> |
|    |                                                                         | Bank Indonesia        | Penyediaan Sarana dan prasarana                                                                                                                         |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                         | DPPM                  | Konsultan terkait perijinan                                                                                                                             |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                         | Bea Cukai             | Konsultan terkait dengan kepabeanan                                                                                                                     |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                         | Balai Karantina       | Konsultan terkait kekarantinaaan produk ekspor impor berupa hewan dan tumbuhan                                                                          |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| NO | KEGIATAN LINTAS SEKTOR                                              | KONTRIBUSI PARA PIHAK                                        |                                                                                                                    | OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN                                                                                                                                                  |                               | MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                     | PIHAK                                                        | KONTRIBUSI                                                                                                         | KELUARAN                                                                                                                                                                     | KELOMPOK SASARAN              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                                                     | Perbankan                                                    | Konsultasi bisnis terkait dengan transaksi keuangan                                                                |                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                                                     | OPD Lainnya                                                  | Konsultan sesuai dengan kewenangannya                                                                              |                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                                                     | Pelaku Usaha DIY                                             | Memberikan masukan berupa permasalahan dan berbagai kendala dalam menjalankan usaha bisnis sebagai bahan pembinaan |                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. | Pemantauan harga dan stok bahan pokok dan penting                   | Disperindag DIY                                              | Koordinator, pengelola data, pemantau di 3 (tiga) pasar percontohan Kota Yogyakarta                                | Informasi Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting sebagai pendukung <i>Early Warning System</i> dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan stabilisasi harga | Masyarakat                    | Bagi OPD: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Perdagangan</li> <li>2. Mendukung pencapaian program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</li> </ol> Bagi Kelompok Sasaran: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stabilitasnya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat</li> </ol> |
|    |                                                                     | Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota                             | Memantau stok dan harga di pasar Kabupaten/Kota dan menyampaikan data hasil pantauan untuk diolah                  |                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                                                     | DPPM                                                         | Menerbitkan perijinan                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                                                     | Pelaku Usaha di DIY                                          | Memberikan umpan balik untuk perbaikan aplikasi OSS dan layanan penerbitan perijinan                               |                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. | Pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) | Disperindag DIY                                              | Mensuplai harga dan stok barang pokok dan bahan penting lainnya                                                    | Rekomendasi kebijakan stabilisasi harga                                                                                                                                      | 1. Pemda DIY<br>2. Masyarakat | Bagi OPD:           Mendukung pencapaian target kinerja program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting<br><br>Bagi Kelompok sasaran: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendapatkan rekomendasi kebijakan stabilisasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya</li> <li>2. Terkendalinya harga dan stok barang pokok dan bahan penting lainnya</li> </ol>   |
|    |                                                                     | Bank Indonesia, Biro Perekonomian, SKPD terkait, Bulog, BUMD | Merumuskan kebijakan terkait pengendalian inflasi                                                                  |                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| NO | KEGIATAN LINTAS SEKTOR                                                                                               | KONTRIBUSI PARA PIHAK                                |                                                                               | OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN                                              |                  | MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                      | PIHAK                                                | KONTRIBUSI                                                                    | KELUARAN                                                                 | KELOMPOK SASARAN |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. | Menekan lonjakan harga dan ketersediaan barang pokok dan bahan penting lainnya melalui Operasi Pasar dan Pasar Murah | Disperindag DIY, Disperindag Kabupaten/Kota          | Menyelenggarakan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah                       | Stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok dan bahan penting lainnya | Masyarakat       | <p>Bagi OPD:<br/>Mendukung pencapaian target kinerja program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</p> <p>Bagi Kelompok sasaran:<br/>1. Terkendalnya harga dan stok barang pokok dan bahan penting lainnya</p> |
|    |                                                                                                                      | Bank Indonesia                                       | Memfasilitasi transportasi                                                    |                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                                                      | TPID DIY                                             | Memberi masukan komoditi yang akan dijual dalam Operasi Pasar dan Pasar Murah |                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                                                      | Bulog, Distributor                                   | Menyediakan bahan kebutuhan pokok dan penting lainnya                         |                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                                                      | Kepolisian setempat                                  | Menjaga keamanan saat berlangsungnya kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah   |                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                                                      | Satgas Pangan Provinsi, Satgas Pangan Kabupaten/Kota | Mengawasi pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah                  |                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |

## BAB IV Penutup

**Bab IV berisi :**  
Kesimpulan  
Langkah Perbaikan  
Kinerja

### 4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2025 dihadapkan pada hambatan dan permasalahan sebagai berikut:
  - a. Ekspor kayu ke negara tujuan utama ekspor DIY, terutama di Uni Eropa, terkendala oleh pemberlakuan regulasi anti deforestasi (*Europe Union Deforestation Regulation/EUDR*).
  - b. Maraknya produk impor yang masuk ke Indonesia dengan harga yang murah.
  - c. Penurunan permintaan ekspor tahun 2025 khususnya dari Amerika sebagai negara tujuan utama ekspor DIY disebabkan dampak resesi Amerika dengan menurunnya permintaan barang ekspor seperti pakaian jadi dan tekstil, dimana kedua komoditi tersebut merupakan komoditi yang mendominasi ekspor DIY
  - d. Penerapan standarisasi produk maupun aturan barang masuk yang terlalu ketat dari negara pengimpor.
  - e. Belum adanya pelabuhan muat ekspor di DIY sehingga menghambat perdagangan. Sementara ini pengiriman barang ekspor diantaranya melalui pelabuhan Tanjung Emas.
  - f. Menurunnya daya beli masyarakat baik Indonesia maupun di negara tujuan ekspor.
  - g. Mahalnya harga transportasi pengiriman/logistik terutama ke eropa karena tidak bisa melewati laut merah.
  - h. Maraknya impor ilegal yang menjadi pesaing dan mematikan industri lokal termasuk di DIY.
  - i. Pemanfaatan teknologi produksi yang masih perlu ditingkatkan
2. Banyaknya kegiatan untuk pengendalian inflasi seperti bazaar, pasar murah dan operasi pasar yang berdampak pada peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok yang dilakukan berbagai instansi

- a. Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY akan meningkatkan pula pendukung sektor pariwisata, termasuk sektor perdagangan.
- b. Adanya sinyal positif pada negara tujuan Utama ekspor DIY seperti pembukaan ekonomi Tiongkok.
- c. Terbukanya pasar ekspor ke India terutama untuk produk-produk tekstil, minyak atsiri, dan kerajinan.
- d. Produk unggulan DIY (Garment, furniture, sarung tangan, dan kerajinan) masih diminati pasar global
- e. Bertambahnya perjanjian Indonesia dgn negara mitra, sehingga preferensi tarif semakin banyak diantaranya:
  - o Indonesia - Chile
  - o Indonesia - Uni Emirat Arab
  - o Indonesia - Mozambik
  - o Indonesia - Australia
  - o Indonesia - Hongkong
- f. Pelaku usaha mampu memenuhi permintaan buyer baik kualitas dan standarisasi produk
- g. Aturan-aturan perdagangan yg mendukung ekspor dan impor, diantaranya:
  - o Permendag yg mengatur kemudahan impor bahan baku produk ekspor khususnya utk kawasan berikat
  - o Penggunaan CEISA 4.0 sehingga eksportir bisa melakukan ekspor secara online
  - o Diperbolehkannya ekspor secara perorangan (tidak harus badan usaha)
- h. Adanya Program-Program Pemerintah Pusat yang mendorong pertumbuhan sektor industri seperti Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri, Program TKDN IK gratis.
- i. Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY akan meningkatkan pula pendukung sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, industri makanan, minuman, dan industri pakaian jadi

#### **4.2. Langkah Perbaikan Kinerja**

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Membuka peluang ekspor ke negara tujuan baru seperti Afrika, Jepang,

Australia, dan Timur Tengah, serta meningkatkan pemasaran domestik melalui optimalisasi penjualan daring.

2. Mendorong pemerintah pusat untuk mencegah dan mengurangi impor ilegal serta peningkatan daya saing produk lokal sehingga mampu bersaing di pasar.
3. Pembinaan kepada pelaku usaha DIY untuk dapat memasarkan produknya melalui aplikasi daring. Pemanfaatan berbagai platform aplikasi daring dapat dioptimalkan mengingat maraknya trend konsumen menggunakan aplikasi untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan.
4. Menjamin ketersediaan stok komoditas pokok penting serta kepastian harga yang tidak melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Penyediaan data harga terkini dan informasi stok barang pokok penting sebagai pendukung *early warning system*. Penyelenggaraan operasi pasar, bazar dan pasar murah dilaksanakan diberbagai tempat terutama mendekati hari besar keagamaan untuk menjamin ketersediaan stok dalam negeri.
5. Meningkatkan kualitas produk industri lokal melalui diversifikasi, inovasi produk, standarisasi, dan sertifikasi agar dapat bersaing dengan produk pesaing. Peningkatan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam pemanfaatan teknologi dapat didorong melalui program hibah peralatan bagi IKM.
6. Mendorong penyediaan dan penggunaan bahan baku lokal serta meningkatkan kemitraan dengan penyedia bahan baku dari provinsi lain.

# L A M P I R A N

*Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)*

| NO  | TUJUAN                                                                                                                | INDIKATOR<br>OR<br>TUJUAN                                    | SASARAN<br>STRATEGIS                                                               | INDIKATOR<br>SASARAN                                                                               | SATUAN   | TARGET KINERJA |      |      |      |      | PENJELASAN                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                       |                                                              |                                                                                    |                                                                                                    |          | 2023           | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |                                                                                                                                                                                |
| (1) | (2)                                                                                                                   | (3)                                                          | (4)                                                                                | (5)                                                                                                | (6)      | (7)            | (8)  | (9)  | (10) | (11) | (12)                                                                                                                                                                           |
| 1.  | Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang istimewa dengan memperhatikan bentuk dan susunan Pemerintahan Asli | Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi | 1) Terwujudnya kelembagaan istimewa yang agile                                     | Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Reformasi birokrasi kategori "sangat baik" (A) | %        | 91,9           | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 100  | Formula perhitungan:<br>jumlah OPD yang telah melaksanakan RB kategori A dibagi jumlah keseluruhan OPD Pemda DIY kali 100%<br>sumber data:<br>Monev Pelaksanaan RB Pemda DIY   |
|     |                                                                                                                       |                                                              | 2) Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah | Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                                      | kategori | A              | A    | A    | A    | A    | Formula Peng hitungan: OPD telah melaksanakan RB dengan kriteria A, Predikat sangat baik, rentang nilai/angka >80-90.<br><br>sumber data:<br>Monev Pelaksanaan RB di Pemda DIY |

## Lampiran 2. Berita Acara Penyelarasan Kinerja



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

*Daerah Istimewa Yogyakarta*

Alamat : Kepatihan Danurejan Yogyakarta 55213, Telepon (0274) 562811, Faksimile (0274) 521818  
Pos-el: roorganisasi@jogjaprov.go.id, Laman: biroorganisasi.jogjaprov.go.id

**BERITA ACARA RAPAT PENYELARASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH  
NOMOR B/00.8.6.3/1622/BK.6**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Ruang Rapat Radyosuyoso/A/B/C/D/Bidang Rendal<sup>7</sup> Bapperida DIY, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : Maria Fithri Agustina, S.E., M.Acc  
NIP : 197908262009122001  
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda  
Alamat : Biro Organisasi Setda DIY, Unit 5, Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Biro Organisasi Setda DIY, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

II Nama : IMAM BUDIDHARMA S.T., M.Ec.Dev  
NIP : 198310072010011020  
Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian  
Alamat : Bapperida DIY, Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama Kepala BAPPERIDA DIY selanjutnya disebut Pihak Kedua.

III Nama : YUNA PANCAWATI, S.E., M.Si  
NIP : 196606041993032007  
Jabatan : Kepala Dinas  
Alamat : Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY selanjutnya disebut Pihak Ketiga.

Sesuai ...

Sesuai dengan hasil pembahasan penyelarasan kinerja Badan/Dinas/Biro disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga secara bersama-sama telah menyepakati penyelarasan kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program Perangkat Daerah sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara ini;
2. Apabila terhadap substansi pada poin 1 (satu) masih memerlukan tambahan data/penjelasan/keterangan, Pihak Ketiga bersedia melengkapi dan memberikan penjelasan lebih lanjut secara tertulis yang disampaikan selambatnya pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Yogyakarta

Pihak Pertama,



Maria Fithri A, S.E.M.Acc

Pihak Kedua,



Imam Budidharma S.T., M.Ec.Dev.

Pihak Ketiga,



Yuna Pambanati, S.E., M.Si



Mengetahui  
Kepala Biro Organisasi,

Ana Widyawati, S.H, M.H



|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pihak Kedua</p> <p>Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta</p>  <p>Hamengku Buwono X</p> | <p>Pihak Pertama</p> <p>Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY,</p>  <p>Yuna Pancawati S.E., M.Si.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PERJANJIAN KINERJA TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY  
 Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

| No  | Tujuan Perangkat Daerah                | Indikator Kinerja                                | Satuan | Target Tahunan | Triwulan     | Target |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------|
| (1) | (2)                                    | (3)                                              | (4)    | (5)            | (6)          | (7)    |
| 1.  | Terwujudnya daya saing sektor industri | Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB DIY | %      | 12,20          | Triwulan I   | 11,50  |
|     |                                        |                                                  |        |                | Triwulan II  | 11,60  |
|     |                                        |                                                  |        |                | Triwulan III | 11,70  |
|     |                                        |                                                  |        |                | Triwulan IV  | 12,20  |

Perjanjian .....

**PERJANJIAN KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY  
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

| No  | Sasaran Strategis                                                             | Indikator Kinerja                               | Satuan   | Target Tahunan | Triwulan     | Target     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|------------|
| (1) | (2)                                                                           | (3)                                             | (4)      | (5)            | (6)          | (7)        |
| 1.  | Meningkatnya industri pengolahan                                              | Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB | %        | 3,0            | Triwulan I   | 2,15       |
|     |                                                                               |                                                 |          |                | Triwulan II  | 2,3        |
|     |                                                                               |                                                 |          |                | Triwulan III | 2,9        |
|     |                                                                               |                                                 |          |                | Triwulan IV  | 3,0        |
| 2.  | Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri                   | Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB         | %        | 5,38           | Triwulan I   | 3,0        |
|     |                                                                               |                                                 |          |                | Triwulan II  | 3,3        |
|     |                                                                               |                                                 |          |                | Triwulan III | 4,3        |
|     |                                                                               |                                                 |          |                | Triwulan IV  | 5,38       |
| 3   | Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah | Kategori RB Perangkat Daerah                    | Kategori | A (85,00)      | Triwulan I   | A (85,00)  |
|     |                                                                               |                                                 |          |                | Triwulan II  | A (85,00)  |
|     |                                                                               |                                                 |          |                | Triwulan III | A (85,00)  |
|     |                                                                               |                                                 |          |                | Triwulan IV  | A (85,00*) |

**Keterangan:**

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

| No  | Program Perangkat Daerah                                                   | Anggaran          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (APBD)                        | Rp 3.644.647.750  |
| 2.  | Program Pengendalian Izin Usaha Industri (APBD)                            | Rp 10.000.000     |
| 3.  | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (APBD)              | Rp 80.457.250     |
| 4.  | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (APBD)                        | Rp 30.000.000     |
| 5.  | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (APBD) | Rp 1.212.393.000  |
| 6.  | Program Pengembangan Ekspor (APBD)                                         | Rp 154.000.000    |
| 7.  | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (APBD)                      | Rp 302.000.500    |
| 8.  | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (APBD)                | Rp 438.000.000    |
| 9.  | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (Dais)   | Rp 1.511.140.100  |
| 10. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)   | Rp 9.456.166.700  |
| 11. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)               | Rp 18.703.506.031 |
|     | Jumlah Anggaran                                                            | Rp 35.542.311.331 |

- Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis

| No | Program Unit Pelaksana Teknis                                                                                                         | Anggaran         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna/APBD)                                           | Rp 337.675.000   |
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna/APBD)                                  | Rp 1.680.131.700 |
| 3. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna/Dais) | Rp 160.910.500   |
|    | Jumlah Anggaran                                                                                                                       | Rp 2.178.717.200 |

3. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
4. Mengelola anggaran dekonsentrasi :
- a. Program Dukungan Manajemen Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka Rp109.886.000
  - b. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp1.289.059.000
  - c. Program Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah Rp122.671.000

Yogyakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua  
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,



Hamengku Buwono X

Pihak Pertama  
Kepala Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan DIY,



Yuna Pancawati S.E., M.Si.

#### Lampiran 4. Evaluasi AKIP Tahun 2024



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

### INSPEKTORAT

Alamat Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Kode Pos 55166 Telepon (0274) 562009  
Faksimile (0274) 512567 Pos-el inspektorat@jogjapro.go.id Laman <https://inspektorat.jogjapro.go.id>

20 Maret 2025

Nomor : R/700.1.2.1 / 459 / INS  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)  
pada Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan DIY Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
DIY

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2024, sebagai berikut:

#### A. PENDAHULUAN

##### 1. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat;

e. Keputusan...

- e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 529/KEP/2024 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- f. Surat Tugas Inspektur DIY Nomor 053/III/INSP/2024 Tanggal 03 Maret 2024 untuk melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2024.

## **2. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi penguatan pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Melalui Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

## **3. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## **4. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Sasaran... f

## 5. Sasaran

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2024.

## 6. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

## 7. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pengembangan sumber daya manusia industri dan perdagangan;
- d. peningkatan pemanfaatan teknologi industri dan mutu standardisasi;
- e. peningkatan kerja sama industri dan perdagangan;
- f. fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan industri dan perdagangan;
- g. pengelolaan dan pelaporan data industri dan perdagangan;
- h. pembinaan dan pengawasan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
- i. fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan infrastruktur industri;
- j. fasilitasi sarana dan prasarana industri;
- k. pembinaan dan pengembangan industri kreatif;
- l. penyediaan layanan/fasilitasi konsultasi input dan sistem informasi industri nasional untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di lingkup Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
- m. fasilitasi rekayasa dan produksi alat tepat guna, layanan perbengkelan, konsultasi teknis dan informasi rekayasa alat tepat guna;
- n. fasilitasi kemasan dan produk kulit;
- o. Pengawasan distribusi bahan berbahaya;

p. Penerbitan... 4

- p. Penerbitan Surat Keterangan Asal dan Fasilitasi Angka Pengenal Impor;
- q. Pelayanan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
- r. Pengawasan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- s. Fasilitasi pengembangan dan promosi dalam negeri dan luar negeri;
- t. Pelayanan perlindungan dan pemberdayaan konsumen;
- u. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- v. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- w. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- x. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
- y. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup Dinas;
- z. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- aa. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- bb. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan; dan
- cc. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari;
  - 1) Subbag Keuangan; dan
  - 2) Subbag Umum.
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri terdiri atas;
  - 1) Pengadministrasi Umum; dan
  - 2) Analis Pengembangan Usaha Agro Industri.
- d. Bidang Sarana dan Prasarana Industri terdiri atas;
  - 1) Pengadministrasi Umum; dan
  - 2) Analis Industri.
- e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri atas;
  - 1) Pengadministrasi Umum;

2) Analisis... *f*

- 2) Analis Perdagangan;
  - 3) Pengawas Barang Beredar dan Jasa; dan
  - 4) Pengelola Fasilitas dan Mediasi Pertindungan Konsumen.
- f. Bidang Perdagangan Luar Negeri terdiri atas;
- 1) Pengadministrasi Umum;
  - 2) Analis Perdagangan; dan
  - 3) Penyusun Rencana Analisis Pasar Luar Negeri.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 8. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala;
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut;
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY telah menggunakan Aplikasi SENGGUH dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi.

Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi ASN Memayu sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu. Inovasi lain dalam peningkatan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yaitu:

1. Pemanfaatan... *f*

1. Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan misalnya aplikasi JBSC (*Jogja Business Service Center*), JogjaKI, SIKONCER, E-Arsip, Jogjaplaza, Sistem Informasi Magang Mahasiswa dan Vokasi (SIMAMAK), dan SILDASI;
2. Fasilitasi pembayaran digital (QRIS) bagi IKM dalam kegiatan-kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diantaranya Pameran PRJ di JIExpo Jakarta, Operasi Pasar;
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi produksi melalui skema pinjam pakai Alat Tepat Guna (ATG) dan layanan perbaikan ATG ke sentra-sentra IKM (Servis Keliling);
4. Menginisiasi pembuatan pembentukan Desa Niaga dengan membuat *Draft* Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Kapasitas IKM serta UKM Berorientasi Ekspor di DIY antara Disperindag DIY dengan LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia);
5. Membentuk Forum Komunikasi Disperindag DIY dan Distributor dalam rangka penyediaan stok bahan pangan;
6. Membentuk Forum Peningkatan Ekspor DIY yang melibatkan berbagai Instansi terkait;
7. Operasi Pasar melalui Kios Segoro Amarto dalam rangka efektivitas pelaksanaan Operasi Pasar;
8. Pemanfaatan media sosial untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi (misalnya pengumuman kurasi pameran, pengumuman seleksi anggota BPSK);
9. Pemanfaatan fitur google (*google form, google calendar, google sheet*) dan *whatsapp group* untuk meningkatkan kerja kolaboratif dan efektivitas;
10. Pemanfaatan media sosial, surat kabar *online* dan media televisi regional untuk publikasi kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY;
11. Melibatkan mahasiswa sebagai peserta dan agen perubahan dalam kegiatan sosialisasi (misal: mahasiswa sebagai peserta Sosialisasi Standardisasi Produk, mengadakan kelas ekspor bagi mahasiswa);
12. Kerjasama pemasaran antara peserta pelatihan dengan instruktur;

13. Menambahkan... 

13. Menambahkan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik pengunjung saat pelaksanaan kegiatan pameran;
14. Pembentukan tim teknis dalam kegiatan rehabilitasi gedung pengemasan dengan melibatkan Dinas PUPR DIY dan Badan POM;
15. Pembangunan aplikasi layanan Desain (Sistem Informasi PDIN);
16. Menjalinkan kerjasama dengan Asosiasi Pangan Steril dalam rangka penyempurnaan konsep layanan kemasan; dan
17. Pembinaan komprehensif berkelanjutan berbasis sentra.

#### 9. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY telah menindaklanjuti dengan:

- a. Penerapan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan;
- b. Peningkatan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
- c. Peningkatan pengendalian internal dalam rangka pencapaian kinerja, tidak hanya pada level *output* yang sudah tercapai, namun diharapkan juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* secara lebih optimal.

### B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

#### 1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memperoleh nilai sebesar 89,81. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,11 atau 90,38% dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 27,03 atau 90,10% dari bobot sebesar 30%;

c. Evaluasi...

- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,49 atau 89,90% dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 22,25 atau 89,00% dari bobot sebesar 25%.

## **2. Rekomendasi**

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY agar:

- a. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga pada masa selanjutnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
- b. Mempertahankan serta meningkatkan praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dalam rangka menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah DIY.

## **C. PENUTUPAN**

### **1. Simpulan**

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memperoleh nilai 89,88. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

### **2. Penguatan AKIP**

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY diharapkan dapat mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian... 

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Inspektur  
  
Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc.

Tembusan:  
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

#### 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2024



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
*Disperindag*

Alamat: Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta Kode Pos 55166, Telepon (0274) 512083  
Faksimile 581335 Pos-el: [disperindag@jogjaprovo.go.id](mailto:disperindag@jogjaprovo.go.id) Laman: [disperindag.jogjaprovo.go.id](http://disperindag.jogjaprovo.go.id)

| No | Saran/Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tindak lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga pada masa selanjutnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Daerah; | Disperindag telah melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga pada masa selanjutnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Daerah; |
| 2. | Mempertahankan serta meningkatkan praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dalam rangka menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah DIY.                                                                                                                  | Disperindag telah berupaya mempertahankan serta meningkatkan praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dalam rangka menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah DIY.                                                                                                         |



Yogyakarta, Mei 2025

Yuna Puncawati, S.E., M.Si



**PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**